

NEWSLETTER

PKS PARLEMEN

KREATIF

November III Tahun 2021 No. 25

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

*Lomba Baca Kitab Kuning V:
Ajak Stakeholder Bangsa*

***Teladani
Pesantren,
Ulama,
dan Santri***



Menolak Untuk Rakyat

Penolakan sejatinya merupakan bentuk dan ekspresi keseriusan dalam menjaga amanat rakyat menghadapi struktur keputusan yang sempit dan ruang kendali yang terbatas. Menjaga marwah rakyat yang tidak mau dikooptasi oleh pihak yang serakah dan rakus.

image : detik.com

Dalam kehidupan demokrasi, rakyat diberikan ruang untuk memiliki kehendak dan keinginan. Namun realitasnya seluruh 'fasilitas' tersebut tidak pernah bisa menjadi kebijakan, karena saat mencapai hilir dipengaruhi sejumlah keinginan dan kepentingan.

Atas dasar keinginan dan kepentingan, pembahasan regulasi digesa sejak pagi, siang, sore hingga malam. Hari berganti, libur pun diterabas. Wabah sekarat pemanis. Jika pun ada partisipasi publik dalam proses pembentukan regulasi sedari awal ditempatkan hanya sebagai prasyarat formal dan administratif, bukan penentu secara substantif dan prinsip.

Karena keinginan dan kepentingan pula sebuah kebijakan yang sangat penting bisa diabaikan dan tidak perlu dibicarakan.

Ingin cepat, ironisnya cepat formal. Kepentingan terpenuhi, mandat rakyat tercederai. Sebuah ironi dari negeri demokrasi yang dihasilkan dari cita-cita luhur reformasi. UU Cipta Kerja jadi contoh nyata dari proses yang buruk, hasil yang tidak baik dan dampak yang merugikan.

Menolak adalah salah satu cara untuk menghentikan kebijakan yang tidak menjerahatkan dan hadirkan keadilan, meski pada akhirnya harus menjadi abu tanpa arang. Nampak percuma di permukaan dan tidak memengaruhi

keputusan, namun penolakan jadi kepastian sikap dan cara pandang. Tolak bukan sekadar benci atau rindu, besar atau kecil, dan lain sebagainya. Tolak sesungguhnya sedang menunjukkan tentang SIKAPAN.

PKS menolak wacana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada saat daya beli masyarakat rendah dan sedang susah. PKS menolak Kenaikan Bea Materai dari 6000 jadi 10.000 karena memberatkan masyarakat dan tidak urgen. PKS Tolak Omnibus UU Cipta kerja karena berpotensi mendorong liberalisasi tanpa batas. PKS menolak RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) karena hadirkan ketidakadilan. PKS menolak RUU Hubungan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) karena resentralisasi keuangan daerah dan mendegradasi otonomi daerah sebagai salah satu amanat reformasi. PKS menolak RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) karena tidak komprehensif dan berpotensi melegalkan perilaku seks di luar pernikahan serta penyimpangan seksual. PKS menolak RUU Ibu kota Negara (IKN) di tengah utang negara yang menumpuk dan menghimpit.

Penolakan sejatinya merupakan bentuk dan ekspresi keseriusan dalam menjaga amanat rakyat menghadapi struktur keputusan yang sempit dan ruang kendali yang terbatas. Menjaga marwah rakyat yang tidak mau dikooptasi oleh pihak

yang serakah dan rakus.

Kehendak, kemauan dan kedaulatan yang dimiliki rakyat penuh keterbatasan, kepura-puraan dan retorika. Hilang tidak berbekas, tersapu waktu yang kian cepat merambat.

Kehidupan politik hari ini sejatinya telah terjadi fenomena 'bertolak belakang' antara pemegang mandat dengan pemberi amanat. Sejumlah kebijakan diproduksi dengan instan dan terburu-buru, minim partisipasi publik karena kesimpulan telah ditentukan di awal proses. Harus jadi dan bisa 'goal', bagaimana pun cara serta bentuknya. Akhirnya sangkarut dan ruwet dimanamana.

Berikan Arahan di Final LBKK FPKS

Ahmad Heryawan: Santri Siap Jadi Garda Terdepan Masalah Keummatan

KUTIPAN

Jakarta (09/12) — Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Ahmad Heryawan mengungkapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada para santri yang dipercaya siap menjadi barisan terdepan dalam membangun dan menangani masalah keummatan dengan lebih baik

Ungkapan tersebut disampaikan pada penutupan final Lomba Baca Kitab Kuning (LBKK) ke V Tingkat Nasional pada Rabu petang (8/12).

“Saya percaya santri ini mampu masuk dalam semua lini kehidupan dan menjadi bermanfaat. Menjadi kiai, ulama, serta pemimpin bagi generasi mendatang. Bahkan terjun dalam dunia demokrasi sekalipun, sudah terbukti santri berada di barisan terdepan dalam meraih kemerdekaan Indonesia.” Tutur mantan Gubernur Jabar periode 2008-2018 yang akrab disapa Aher ini.

LBKK yang diselenggarakan sejak 20 Oktober 2021 ini

**BABAK FINAL LOMBA BACA
KITAB KUNING®
TINGKAT NASIONAL 2021**

merupakan salah satu program unggulan Fraksi PKS sebagai upaya menghidupkan tradisi keilmuan. Kitab Kuning adalah sebuah terminologi yang populer di kalangan para pembelajar ilmu agama. Secara turun-temurun, kiab tersebut dicetak menggunakan kertas berwarna kuning dan tanpa tanda baca (harakat).

“Secara kesehatan membaca kertas berwarna kuning ini yang paling memudahkan dan nyaman bagi mata para pembaca. Namun dibalik itu,

Kitab Kuning merupakan sumber ilmu yang mempelajari masalah keislaman secara utuh dan lengkap, sanadnya pun jelas.” Jelas Aher.

Dalam kesempatan tersebut, Aher menuturkan sanad dari kitab fiqh Fathul Mu’in hingga ke Imam Syafi’i, Umar RA dan Nabi Muhammad SAW sehingga keilmuannya dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mendorong bahwa untuk menghadapi persoalan agama, setiap orang perlu mempelajari Kitab Kuning sebagai sumber ilmu yang terperinci dan digabung dengan bacaan lain agar lebih komprehensif dan tepat sasaran.

“Saya sangat menaruh hormat kepada para santri, para pembelajar. Kalian memiliki keterampilan membaca Kitab Kuning yang sangat unik dan mengagumkan. Insyallah kalianlah yang akan menjadi menara-menara ilmu bagi bangsa dan negara menuju Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.” Pungkas Aher menegaskan tentang komitmen PKS berpegang teguh pada islam dan keilmuannya.

**Dr. H. AHMAD HERYAWAN, Lc., M.Si**

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS

“Saya percaya santri ini mampu masuk dalam semua lini kehidupan dan menjadi bermanfaat. Menjadi kiai, ulama, serta pemimpin bagi generasi mendatang. Bahkan terjun dalam dunia demokrasi sekalipun, sudah terbukti santri berada di barisan terdepan dalam meraih kemerdekaan Indonesia”

Buka Final Lomba Baca Kitab Kuning, Presiden PKS: **Hidupkan** Literasi Generasi Gemilang

KUTIPAN

Di Era saat ini, Perkembangan literasi semakin lengkap dan sempurna, hal tersebut turut serta didukung oleh adanya upaya membangun budaya literasi sebagai bentuk kemajuan di negeri ini.

Jakarta (08/12) — Presiden PKS Ahmad Syaikhun menyampaikan apresiasi atas keberlangsungan dari Lomba Baca Kitab Kuning guna membangun budaya literasi di negeri ini.

Syaikhun menyampaikan hal tersebut dalam acara Babak Final Lomba Baca Kitab Kuning tingkat nasional 2021 yang diadakan melalui aplikasi Zoom pada Rabu (08/12).

Di Era saat ini, Perkembangan literasi semakin lengkap dan sempurna, hal tersebut turut serta didukung oleh adanya upaya membangun budaya literasi sebagai bentuk kemajuan di negeri ini.

"Lomba Baca Kitab Kuning sebagai wadah untuk memberikan motivasi kepada generasi muda guna menghidupkan tradisi literasi" ujar Anggota Komisi 1 tersebut.

BABAK FINAL LOMBA BACA KITAB KUNING[®] TINGKAT NASIONAL 2021

Selanjutnya beliau menyampaikan untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik maka perlu adanya gebrakan yang tidak hanya mendorong rasa cinta tanah air akan tetapi juga mempelajari islam dengan baik dan mendalam.

"Lomba Baca Kitab Kuning hadir sebagai bentuk upaya untuk mencetak ulama dan santri yang berwawasan luas" Ungkap Anggota DPR Dapil Jabar tersebut.

Selanjutnya Lomba Baca Kitab Kuning sebagai perwujudan dari peran santri yang akan mewarnai negeri melalui nilai keislaman yang sifatnya Rahmatan Lil Alamin.

"Di negeri ini, kita

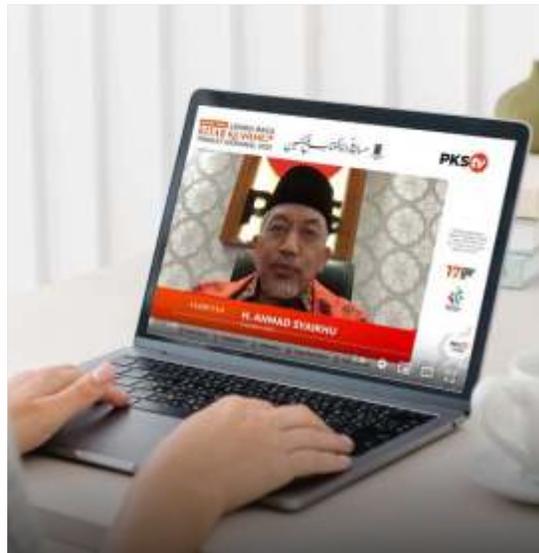
membutuhkan ulama yang memiliki sifat negarawan, dan juga membutuhkan negarawan yang memiliki sifat keulamaan", Jelas Ahmad Syaikhun

Tidak Hanya itu, melalui lomba Baca Kitab, Masyarakat akan memahami bahwasanya banyak manfaat yang didapat mengingat terdapat kesulitan dalam membaca dan memahami kitab fiqh klasik tersebut.

"Totalitas yang diberikan dalam lomba baca kitab kuning merupakan bentuk perjuangan kita berjuang dijalan Allah SWT, sebab kita harus belajar islam dengan baik dan mendalam" tuturnya.



Untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik maka perlu adanya gebrakan yang tidak hanya mendorong rasa cinta tanah air akan tetapi juga mempelajari islam dengan baik dan mendalam. Lomba Baca Kitab Kuning hadir sebagai bentuk upaya untuk mencetak ulama dan santri yang berwawasan luas"



H. AHMAD SYAIKHUN
Presiden PKS

Final LBKK 2021, Fraksi PKS DPR RI sukses menyelenggarakan Final Lomba Baca Kitab Kuning (LBKK) ke-5 Tahun 2021 pada Rabu, 8 November 2021.

Menjaga Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah

KUTIPAN

Jakarta (09/12) --- Fraksi PKS DPR RI sukses menyelenggarakan Final Lomba Baca Kitab Kuning (LBKK) ke-5 Tahun 2021 pada Rabu, 8 November 2021.

Kesuksesan ditunjukkan dari peningkatan jumlah peserta dan finalis lomba dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini total jumlah peserta 3.043 peserta dari 23 Provinsi dari ribuan pesantren di Indonesia.

Adapun kitab yang dilombakan adalah Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Dewan Juri lomba: KH. Syuhada Syarkun (Wakil Kepala Madrasah Aliyah Tebuireng 2009-2012), Dr. KH. Muslih Abdul Karim, MA (Ketua Umum MAPADI/Alumni Pesantren Langitan Tuban), Dr. KH. Ali Ahmadi, MA Al-hafidz (Ketua BPU DPP PKS/Alumni Pesantren Raudlatul Ulum Pati, Jawa Tengah).

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini peningkatan jumlah peserta hingga 200

BABAK FINAL LOMBA BACA KITAB KUNING[®] TINGKAT NASIONAL 2021

persen ini menunjukkan antusiasme para santri dalam menyiarkan ilmu para ulama salafusshalih melalui kitab kuning yang menjadi rujukan utama dalam mendalami agama.

"Kami bersyukur, program unggulan Fraksi PKS direspon luas oleh para ulama, santri, dan pesantren. Kembali kami tekankan bahwa sejak Indonesia merdeka baru pertama kali kitab kuning dilombakan di parlemen. Ini bentuk penghormatan Fraksi PKS kepada para ulama, santri, dan pesantren yang begitu besar jasanya bagi republik," ungkap Jazuli.

Melalui lomba ini, lanjut

Jazuli Juwaini, Fraksi PKS semakin mengokohkan komitmennya untuk terus menjaga akidah ahlu sunnah wal jamaah sebagai jalan keselamatan umat Islam di dunia dan akhirat.

"Inilah garis perjuangan PKS, sebagaimana diulang-ulang oleh Ketua Majelis Syuro PKS Habib Doktor Salim Segaf Aljufri, untuk selalu mengokohkan akidah ahlu sunnah wal jamaah," terangnya.

LBKK Fraksi PKS ini diselenggarakan setiap tahun dalam rangka Peringatan Hari Sani Nasional. Fraksi PKS ingin mengajak generasi bangsa untuk mendalami ilmu agama melalui rujukan utama karya ulama ahlu sunnah yang muktabar sekaligus meneladani keikhlasan, ketawadhuhan, dan pengorbanan para ulama bagi bangsa Indonesia.

"Ulama dan santri sejak dulu berfikir apa yang bisa disumbangkan untuk bangsa dan negara, bukan apa yang bisa diambil dari bangsa dan negara."

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Ulama dan santri sejak dulu berfikir apa yang bisa disumbangkan untuk bangsa dan negara, bukan apa yang bisa diambil dari bangsa dan negara. Kita harus meneladani akhlak ulama dan keikhlasan mereka dalam membangun harmoni bangsa. Fraksi PKS ingin menghadirkan islam rahmatan lil alamin. Islam yang teduh, yang menyatukan, yang menghadirkan perdamaian, dan merangkul seluruh elemen bangsa"

Ketua FPKS Ajak Stakeholder Bangsa Teladani Ulama, Pesantren, dan Santri

KUTIPAN

Jazuli juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk meneladani ulama, pesantren, dan santri dalam membangun bangsa. Hal ini dijelaskannya sebagai salah satu upaya menghormati peran mereka dalam membangun bangsa.

Jakarta (8/12) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menekankan pentingnya meneladani ulama, pesantren, dan santri dalam sambutannya pada Final Lomba Baca Kitab Kuning (LBKK) PKS DPR RI pada Hari Rabu (8/12/2021).

Jazuli menyebutkan peran ulama, pesantren, dan santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

"Kita tidak mengkalim mereka sebagai satu-satunya pejuang kemerdekaan, tapi perjuangan mereka tidak bisa diingkari, mereka telah berjuang dengan segala macam perjuangannya, berjuang dengan ikhlas, sampai Indonesia ini merdeka," ujar anggota Komisi I DPR RI tersebut.

BAKAB FINAL LOMBA BACA KITAB KUNING^o TINGKAT NASIONAL 2021

Jazuli juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk meneladani ulama, pesantren, dan santri dalam membangun bangsa. Hal ini dijelaskannya sebagai salah satu upaya menghormati peran mereka dalam membangun bangsa.

"Mereka berpikir apa yang bisa kita berikan kepada Indonesia, bukan memikirkan apa yang dapat kita ambil dari kekayaan negara ini, tetapi apa yang bisa kita sumbang untuk bangsa ini."

"Maka dari itu, mari seluruh stakeholder bangsa ini

meneladani akhlak para ulama agar kita membangun bangsa ini dengan harmonisasi hubungan antara satu komponen bangsa dgn komponen lainnya," jelas Aleg dari Dapil Banten II yang meliputi Serang-Cilegon.

Terakhir, Ia menjelaskan alasan LBKK menjadi salah satu program unggulan FPKS DPR RI adalah untuk menumbuhkan dan mengokohkan rasa cinta anak bangsa kepada kitab kuning.

Menurutnya, hal ini karena kitab kuning adalah salah satu literatur yang sangat luas, dimana seluruh nilai-nilai agama banyak yang tertulis dalam Bahasa Arab.

"Ketika kita bisa baca bahasa Arab, level pengetahuan kita akan semakin luas, tidak hanya dalam bidang agama namun juga bidang lainnya," tutup Ketua Fraksi PKS DPR RI tersebut.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Mereka berpikir apa yang bisa kita berikan kepada Indonesia, bukan memikirkan apa yang dapat kita ambil dari kekayaan negara ini, tetapi apa yang bisa kita sumbang untuk bangsa ini. Maka dari itu, mari seluruh stakeholder bangsa ini meneladani akhlak para ulama agar kita membangun bangsa ini dengan harmonisasi hubungan antara satu komponen bangsa dgn komponen lainnya,"

Ikuti Lomba Baca Baca Kitab Kuning, Finalis Mengakui **Pelajari** Kitab Fathul Mu'in Selama 40 Hari

KUTIPAN

Jakarta (09/12) — Fraksi PKS baru saja menggelar komba Baca Kitab Kuning (LBKK) ke V Tingkat Nasional yang dilaksanakan sejak 20 Oktober 2021.

Para finalis yang telah melalui seleksi tingkat kabupaten/kota hingga provinsi pernah melenggang menuju Grand Final pada Rabu lalu (08/12/2021).

"Alhamdulillah wa syukurillah, terimakasih kepada PKS yang telah mengadakan Lomba Baca Kitab Kuning ini, jujur saya sempat pesimis, tidak pernah menyangka bisa memenangkan LBKK tahun ini." Ucap Sholihan dalam sambutannya selaku juara pertama.

Final LBKK tahun ini diselenggarakan secara online. Dari 24 finalis yang mewakili 24 provinsi akan diambil 6 juara. Untuk mengikuti babak final, para finalis berarti mampu berhasil menggeser 3.044 peserta LBKK lainnya. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 200% dari jumlah peserta tahun lalu, yakni sekitar 1.080

BABAK FINAL LOMBA BACA **KITAB KUNING**[®] TINGKAT NASIONAL 2021

santri dan alumni pesantren.

KH. Syuhada Syarkun, MHI., Dr. KH. Muslih Abdul Karim, MA., Al Hafidz, serta Dr. KH Ali Akhmadi, MA., Al Hafidz merupakan tiga tokoh alumni pesantren didapuk sebagai dewan juri pada lomba tersebut.

Oleh para dewan juri, disepakati bahwa keenam finalis LBKK ke V ini adalah Sholihan santri Pondok Pesantren Mambaul Falah Jawa Timur dengan perolehan skor 890. Juara kedua adalah Agus Sholehuddin dari Pondok Pesantren Al Barokah mewakili Provinsi Jawa Barat dengan skor 887. Juara ketiga adalah Fitria Raudhatul Jannah mewakili Provinsi Riau dengan skor 886.

Sementara itu, Juara harapan satu adalah Muhammad Yusuf dari Pondok Pesantren Al Azhar Assyarif Kalimantan Selatan dengan skor 884. Juara harapan kedua adalah Panjat Anarki Sulintang dari Pondok Pesantren KHAS Kempek DKI Jakarta dengan skor 866 dan juara harapan ketiga adalah Maulidul Fajri mewakili Provinsi Aceh dengan skor 863.

"Jujur, untuk mengikuti LBKK ini, saya mempersiapkannya sampai sampai tidak pernah mempelajari kitab lain kecuali Fathul Mu'in selama 40 hari." ulas Sholihan menceritakan perjuangannya hingga berhasil mendapatkan hadiah umroh atau uang senilai 30 juta rupiah.

Kitab Fathul Mu'in sendiri merupakan kitab populer di kalangan para santri yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari. Kitab fiqh yang sanadnya sampai ke Rasulullah ini memiliki keunikan dimana bab tentang sholat diletakkan pada bab awal, sedangkan kitab fiqh lainnya membahas bab thaharah pada bab awalnya.



SHOLIHAN

Juara 1 Lomba Baca Kitab Kuning Kelima 2021
Asal Jawa Timur

"Alhamdulillah wa syukurillah, terimakasih kepada PKS yang telah mengadakan Lomba Baca Kitab Kuning ini, jujur saya sempat pesimis, tidak pernah menyangka bisa memenangkan LBKK tahun ini"

Penyelenggaraan LBKK ini merupakan bukti bahwa PKS ingin menghidupkan tradisi keilmuan dengan berpedoman pada sumber ilmu yang rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan seperti Kitab Kuning.

PKS juga berkomitmen

untuk menyelenggarakan lomba tersebut tiap tahunnya untuk memacu semangat para santri dan alumni pondok pesantren dalam mengembangkan keterampilan uniknya membaca kitab gundul (tanpa harakat) tersebut.

PEMENANG BABAK FINAL

LOMBA BACA KITAB KUNING V 2021

8 Desember 2021

PEMENANG	NILAI	HADIAH
 JUARA 1 SHOLIHAN PROVINSI JAWA TIMUR	890	Rp 30.000.000 (UMRAH)
 JUARA 2 AGUS SHOLEHUDDIN A. PROVINSI JAWA BARAT	887	Rp 25.000.000
 JUARA 3 FITRIA RAUDHATUL J. PROVINSI RIAU	886	Rp 20.000.000
 JUARA HARAPAN 1 MUHAMMAD YUSUF PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	884	Rp 15.000.000
 JUARA HARAPAN 2 PANJAT ANARKI S. PROVINSI DKI JAKARTA	866	Rp 10.000.000
 JUARA HARAPAN 3 MAULIDUL FAJRI PROVINSI ACEH	863	Rp 5.000.000



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Ketua FPKS DPR Kembali Ajak **Potong Gaji** Alegnya untuk Korban Letusan Gunung Semeru

KUTIPAN

Jakarta (05/12) --- Musibah meletusnya Gunung Semeru di Lumajang Jawa Timur mendapat respon duka cita dan kepedulian dari Fraksi PKS DPR RI.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyampaikan duka cita dan keprihatinan kepada masyarakat yang terdampak musibah letusan Gunung Semeru.

Jazuli kembali menginstruksikan jajaran Fraksi untuk membantu masyarakat semaksimal mungkin.

"Atas nama Fraksi PKS kami ucapkan duka cita dan keprihatinan mendalam atas musibah meletusnya Gunung Semeru. Semoga korban jiwa meninggal segera dapat dievakuasi. Keluarga dan masyarakat diberikan kesabaran dan ketabahan," ungkapnya.

Jazuli mengatakan, struktur dan kader Partai Keadilan Sejahtera telah turun di kesempatan pertama di lokasi bencana untuk membantu proses evakuasi dan tanggap darurat.

"Komitmen PKS sejak dulu adalah bergerak cepat membantu masyarakat yang tertimpa bencana," terangnya

Jazuli juga mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia dimanapun berada bergerak membantu korban bencana dengan cara dan kemampuan masing-masing sebagai bentuk solidaritas sosial nasional.

Fraksi PKS sendiri, lanjut Jazuli, akan terus mensupport bantuan salah satunya dengan kembali mendonasikan gaji dewan bulan Desember untuk korban bencana Gunung Semeru.

"Saya pribadi menyerahkan gaji bulan Desember untuk membantu masyarakat korban letusan Gunung Semeru. Selanjutnya kami juga mengajak seluruh aleg

PKS dari pusat hingga daerah untuk potong gaji. Mudah-mudahan dalam waktu dekat terealisasi dan bisa disampaikan segera," seru Jazuli.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini berharap Pemerintah bergerak cepat menangani bencana kali ini terutama dalam mengevakuasi warga masyarakat di lokasi terdekat dengan Gunung Semeru. Mitigasi dan penanganan korban jiwa harus dilakukan secara koordinatif dan sistematis agar dapat menyelamatkan banyak nyawa masyarakat.

"Kita berharap Pemerintah, BPBD dan BNPB, bergerak cepat, sistematis, dan koordinatif untuk menyelamatkan warga masyarakat. Jangan sampai ada hambatan teknis koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah karena keselamatan korban adalah prioritas utama saat ini," tandas Jazuli.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Saya pribadi menyerahkan gaji bulan Desember untuk membantu masyarakat korban letusan Gunung Semeru. Selanjutnya kami juga mengajak seluruh aleg PKS dari pusat hingga daerah untuk potong gaji. Mudah-mudahan dalam waktu dekat terealisasi dan bisa disampaikan segera"



Terkait Keputusan MK atas UU Ciptaker **Aleg PKS: Kesempatan Penyesuaian dengan UU Pemerintahan Aceh**

KUTIPAN

MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena cacat secara formil lantaran dalam proses pembahasannya tidak sesuai dengan aturan yang diantaranya tidak memenuhi unsur keterbukaan.

Jakarta (29/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Aceh Rafli merespon keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, inkonstitusional bersyarat.

Dalam putusannya, MK juga memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja tersebut maksimal dalam waktu dua tahun ke depan.

"Bagi Aceh, ini kesempatan penyesuaian dan peluang memperkuat keberadaan Undang - Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), ada waktu 2 tahun kedepan memperbaiki bagian mana saja dalam UU CK

yang menggilas kekhususan Aceh sesuai UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Kita selaras dengan putusan MK bahkan sejak RUU hendak disahkan, Kita dari Fraksi PKS menyatakan tolak UU tersebut," Ujar Rafli di Jakarta, Sabtu (27/11)

Kendati demikian, Rafli juga menyebutkan kondisi ini dikhawatirkan bisa memperburuk iklim investasi karena terjadi ketidakpastian hukum

"Bagi investor, kan butuh sebuah kepastian hukum dan keamanan di tempat ia berinvestasi, maka inkonstitusional bersyarat ini harus segera kita respon agar ada kepastian hukum," kata Rafli.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang gugatan uji formil UU Cipta Kerja di Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena cacat secara formil lantaran dalam proses pembahasannya tidak sesuai dengan aturan yang diantaranya tidak memenuhi unsur keterbukaan.

UU Cipta kerja juga disinyalir mempengaruhi keberadaan 82 undang - undang lain. Termasuk UU NO 37 Tahun 2000 Tentang perubahan bebas Sabang.



RAFLI

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Nanggroe Aceh Darussalam I

"Bagi Aceh, ini kesempatan penyesuaian dan peluang memperkuat keberadaan Undang - Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), ada waktu 2 tahun kedepan memperbaiki bagian mana saja dalam UU CK yang menggilas kekhususan Aceh sesuai UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Kita selaras dengan putusan MK bahkan sejak RUU hendak disahkan, Kita dari Fraksi PKS menyatakan tolak UU tersebut"

MK Sebut Pembentukan UU
Cipta Kerja Inkonstitusional,

Wakil Ketua FPKS: Kenapa Tetap Berlaku?

KUTIPAN

Meskipun mengapresiasi putusan MK yang menyatakan proses pembentukan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional, namun Netty mengaku heran kenapa putusan MK menyebut UU ini tetap berlaku.

Jakarta (29/11) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan proses pembentukan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional.

"Putusan MK ini membuktikan bahwa memang sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja bermasalah dan inkonstitusional. Pembahasan UU Cipta Kerja cenderung dipaksakan dan dibahas secara kilat sehingga tidak transparan dan banyak menabrak aturan main dalam proses pembentukan Undang-Undang" kata Netty dalam keterangan tertulis.

"PKS menolak pengesahan UU ini lantaran prosesnya yang

cacat formal dan terbukti menghasilkan UU yang dapat merugikan buruh, membuka pintu TKA besar-besaran, mengancam kedaulatan negara, liberalisasi sumber daya alam, merusak kelestarian lingkungan dan sebagainya" tambahnya.

Meskipun mengapresiasi putusan MK yang menyatakan proses pembentukan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional, namun Netty mengaku heran kenapa putusan MK menyebut UU ini tetap berlaku.

"Seharusnya jika memang proses legislasinya buruk dan dinyatakan MK sebagai inkonstitusional, maka produk hukum yang dihasilkan juga inkonstitusional. Tapi ini aneh kenapa justru MK

mengonfirmasi berlakunya UU Cipta Kerja ini? Jangan sampai MK terkesan sangat politis. MK merupakan lembaga pengawal konstitusi dan yang paling berhak memutuskan mana peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan mana yang tidak. Ibaratnya MK ini seperti penjaga gawang terakhir konstitusi" katanya.

Terakhir Netty menyebut pihaknya akan terus mengawal proses perubahan UU Cipta Kerja di lembaga DPR RI sampai dua tahun kedepan.

"Kita di Fraksi PKS DPR RI bersama-sama masyarakat akan terus mengawal proses perubahan UU Cipta Kerja agar sesuai dengan aturan hukum. Kita juga akan awasi agar dalam waktu dua tahun kedepan tidak ada Peraturan Pelaksana lagi yang dibuat oleh pemerintah sebagaimana keputusan MK" ungkapnya.



Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

"Bagi Aceh, ini kesempatan penyesuaian dan peluang memperkuat keberadaan Undang - Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), ada waktu 2 tahun kedepan memperbaiki bagian mana saja dalam UU CK yang menggilas kekhususan Aceh sesuai UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Kita selaras dengan putusan MK bahkan sejak RUU hendak disahkan, Kita dari Fraksi PKS menyatakan tolak UU tersebut"

Kunspek Komisi II DPR RI, Aleg PKS **Berjuang** Optimalkan HGU untuk Kesejahteraan Rakyat

KUTIPAN

Lampung (08/12) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Teddy Setiadi melakukan kunjungan kerja spesifik (kunspek) ke Provinsi Lampung guna membahas masalah pertanahan, tata ruang, serta evaluasi dan pengukuran ulang terhadap Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) (06/12/2021).

Teddy menyampaikan bahwa dari hasil kunjungan ke beberapa tempat selain kasus mafia tanah, ditemukan pula belum optimalnya penggunaan HGU dan penyalahgunaan penggunaan HGU.

"Mafia tanah sudah mulai tersingkap ke permukaan, sekarang kita juga mendapatkan informasi sengketa antara tanah rakyat dengan perusahaan, kemudian HGU yang tumpang tindih dengan kepentingan atau lahan yang lain, oleh karena itu kita pun mengundang beberapa

perusahaan di Lampung untuk ikut berdiskusi mengenai permasalahan ini," ungkap Teddy.

Lebih lanjut, Teddy menyampaikan bahwa permasalahan HGU itu terbagi 2, yaitu lahan HGU yang ditelantarkan dan Lahan yang sudah dimanfaatkan tetapi belum terdaftar HGU.

"Kami berupaya agar masyarakat bisa mendapatkan kesejahteraan dengan adanya pengelolaan lahan yang produktif, disamping itu harus ada inventarisasi, penertiban

administrasi, dan evaluasi dari dinas terkait mengenai permasalahan lahan ini." Jelas Teddy

Teddy juga ikut terlibat dan mendukung upaya komisi II DPR RI dalam pengumpulan data dan informasi menyeluruh yang nantinya akan disampaikan dan didiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab seperti ATR/BPN, KLHK maupun aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan lahan ini.

"Lampung adalah salah satu provinsi yang banyak menghasilkan komoditas hasil pertanian, kita berharap HGU yang terlanjar juga bisa dikelola menjadi produktif untuk kesejahteraan rakyat." Pungkas Teddy



TEDDY SETIADI, S.Sos.

Anggota Komisi II DPR RI

"Mafia tanah sudah mulai tersingkap ke permukaan, sekarang kita juga mendapatkan informasi sengketa antara tanah rakyat dengan perusahaan, kemudian HGU yang tumpang tindih dengan kepentingan atau lahan yang lain, oleh karena itu kita pun mengundang beberapa perusahaan di Lampung untuk ikut berdiskusi mengenai permasalahan ini

Legislator PKS: RUU IKN Berpotensi Rugikan Negara, Bukan Prioritas Utama

KUTIPAN

Jakarta (15/12) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyroti RUU Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang belum memiliki urgensi mendesak bagi seluruh masyarakat yang tinggal di Daerah Khusus Ibu Kota Negara Indonesia pada Rabu, (15/12/2021) di Jakarta.

Menurut Mardani, dengan alasan sering terjadi kemacetan, banjir tahunan, hingga supply air baku yang merupakan alibi Pemerintah pusat ini adalah pembenaran diatas 'status quo' yang sama-sama memiliki permasalahan serupa di setiap wilayah Indonesia.

"Seharusnya Pemerintah fokus membantu Pemda dan Stakeholders lainnya yang terkait dengan masalah tata kelola perkotaan," Ujar Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Sampai saat ini, Mardani juga membandingkan proyek IKN yang membutuhkan pasokan anggaran yang tidak sedikit itu, sebaiknya sumberdaya juga anggarannya difokuskan

untuk menyelamatkan Pantai Utara Jawa dari ancaman tenggelam pada tahun 2040-2050 berdasarkan kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2021.

"Dari kajian BRIN itu, selain Jakarta yang diprediksikan akan tenggelam, ada juga daerah Cirebon, Pekalongan, Semarang, Surabaya, bahkan di Demak sudah ada desa yang tenggelam," beber Legislator Dapil DKI Jakarta I ini.

Lebih lanjut, Mardani mengatakan, anggaran IKN digadag-gadangkan akan mendapatkan suntikan dari 'sumber lain' dalam implementasinya nanti.

"Akan tetapi berkaca dari kasus Kereta Cepat Jakarta-

Bandung (KCJB) yang awalnya menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan ketentuan awal tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun sangat disayangkan pemerintah dengan mudah mengubah peraturan KCJB yang akhirnya menggunakan dana APBN, " pungkasnya.

Hal ini juga akan meningkatkan resiko kewajiban kontinjensi BUMN atau resiko KPBU. Jangan sampai ketika BUMN mengalami kesulitan likuiditas, pemerintah akan memberikan suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN.

"Saat ini skema KPBU yang ditawarkan juga tidak ada jaminan bahwa APBN tidak akan terlibat dalam mendanai IKN, Ketertarikan swasta juga masih menjadi tanda tanya besar, ditambah lagi dengan iklim investasi masih belum baik di tengah polemik UU Cipta Kerja," tutup Mardani dalam pernyataannya.



Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

“Dengan alasan sering terjadi kemacetan, banjir tahunan, hingga supply air baku yang merupakan alibi Pemerintah pusat ini adalah pembenaran diatas ‘status quo’ yang sama-sama memiliki permasalahan serupa di setiap wilayah Indonesia. Seharusnya Pemerintah fokus membantu Pemda dan Stakeholders lainnya yang terkait dengan masalah tata kelola perkotaan”

REFERENSI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Silahkan diunduh buku
versi pdf-nya atau membaca
langsung versi digitalnya.

**REKAM
JEJAK**

**FRAKSI PKS DALAM
RUU CIPTA KERJA
(OMNIBUS LAW)**

Anggota DPR Nasir Djamil Harap KY Raih ISO dalam Seleksi Calon Hakim Agung

KUTIPAN

Jakarta (01/12) -- Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyampaikan apresiasi karena Komisi Yudisial (KY) telah menyelenggarakan Sosialisasi dan Penjaringan Calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc Tipikor di MA Tahun 2021/2022.

Acara ini yang merupakan bagian dari pola KY untuk proses rekrutmen yang dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Nasir Djamil mengatakan bahwa menjadi hakim tinggi itu adalah cita-cita, dan menjadi hakim agung adalah mimpi. Oleh karena itu. Namun, untuk mewujudkan mimpi itu tidak mudah. Sebelum ada Undang-Undang No 14 tahun 1985 tentang MA, rekrutmen yang dilakukan secara tertutup. Setelah amandemen UUD NRI 1945 hadir KY yang salah tugasnya adalah melakukan seleksi CHA.

"Artinya di sini rekrutmen tersebut sudah mulai terbuka,

ada partisipasi di dalamnya. Dalam perjalanannya, KY terus berusaha memperbaiki bagaimana pola rekrutmennya," ucap Nasir.

Selanjutnya Nasir berharap proses seleksi KY itu juga harus mendapatkan ISO. Hal itu agar proses tersebut harus mendapat pengakuan terkait standar internasional yang dimiliki, sehingga DPR akan mengikuti pola rekrutmen dari KY. Selain itu, KY juga tidak boleh berlepas tangan dengan memilih CHA yang seadanya.

"KY harus berusaha dengan segala kreatifitasnya untuk memastikan CHA yang dikirim seluruhnya diterima oleh DPR sehingga tidak ada calon

yang sia-sia," pungkas Nasir.

Dalam kesempatan sama, Rektor UIR Syafrinaldi berharap dari acara ini bisa diperoleh pemahaman lika-liku dan celah dalam rangka untuk mendapatkan kelolosan sampai tingkat akhir. Syafrinaldi sebagai orang yang pernah mendaftarkan diri dalam seleksi CHA mengaku ingin memberikan masukan kepada KY ataupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lebih lanjut Syafrinaldi menyarankan perlu ada studi perbandingan dari negara lain di mana calon yang diberikan kesempatan untuk menjadi CHA tidak hanya melalui jalur karier saja.

"Perlu dipertimbangkan oleh KY dan DPR dalam mencari CHA untuk membidik calon-calon yang dianggap bersih dan memiliki integritas terlebih dahulu sesuai dengan bidang karir yang diminta oleh MA. Untuk CHA nonkarier memungkinkan sesuai kebutuhan bisa ikut seleksi berdasarkan ketentuan yang berlaku," pungkas Syafrinaldi.



H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi III DPR RI

"Perlu dipertimbangkan oleh KY dan DPR dalam mencari CHA untuk membidik calon-calon yang dianggap bersih dan memiliki integritas terlebih dahulu sesuai dengan bidang karir yang diminta oleh MA. Untuk CHA nonkarier memungkinkan sesuai kebutuhan bisa ikut seleksi berdasarkan ketentuan yang berlaku,"

Antisipasi Lonjakan Kasus Corona Saat Libur Nataru, Aleg PKS **Dorong** Sinergitas Polri dan Pemerintah

KUTIPAN

Anggota Komisi III tersebut menerangkan kegiatan pengawasan yang dilakukan di Komisi III, salah satunya pengawasan terhadap Polda dalam rangka penanganan Covid-19.

Jakarta (7/12) —Anggota Fraksi PKS DPR RI Adang Daradjatun mendorong peran Polri dalam mengawasi mobilitas masyarakat pada Libur Nataru.

Hal itu disampaikan pada segmen PKS Legislative Report Edisi Rapat Paripurna yang diadakan pada Hari Selasa pagi (07/12) di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara 2, DPR RI.

Anggota Komisi III tersebut menerangkan kegiatan pengawasan yang dilakukan di Komisi III, salah satunya pengawasan terhadap Polda dalam rangka penanganan Covid-19.

"Kita melakukan suatu pengawasan apa yang dilakukan oleh Polda-Polda

dalam rangka pengamanan Covid-19 dalam konteks pembangunan ekonomi dan kesehatan nasional," ujar mantan Wakil Kepala Polri tersebut.

Adang juga mendukung adanya kerja sama antara Polri dan Pemerintah dalam penanganan masalah Covid-19, terlebih munculnya varian baru yaitu Omicron.

"Masalah bantuan Polri kepada pemerintah dalam konteks penanganan Covid-19 juga mudah-mudahan cepat selesai," imbuh Aleg dari Dapil DKI Jakarta III tersebut.

"Mudah-mudahan (juga) menjelang (libur) Nataru diharapkan masyarakat tetap dirumah dan tidak usah

jalan-jalan tahun ini karena kita tahu ada covid baru yang sangat membahayakan (dan) kita tau sama persis bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat," tegasnya

Selain itu, Adang juga menyampaikan agenda-agenda lain yang akan dibahas pada Rapat Paripurna, antara lain pengesahan RUU Kejaksaan, laporan BPK terkait penggunaan APBN, serta pelantikan anggota PAW (Pergantian Antar Waktu).



Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Komisi III DPR RI



"Mudah-mudahan (juga) menjelang (libur) Nataru diharapkan masyarakat tetap dirumah dan tidak usah jalan-jalan tahun ini karena kita tahu ada covid baru yang sangat membahayakan (dan) kita tau sama persis bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat

Fraksi PKS **Setuju** RUU Kejaksaan RI, Wujudkan Profesionalitas dan Imparsialitas Kejaksaan

KUTIPAN

Jakarta (06/12) - Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan catatan FPKS terhadap RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pendapat tersebut disampaikan pada Rapat Komisi III DPR RI pada Senin, (06/12/2021) di Jakarta.

Dalam pembahasannya, meskipun menyetujui RUU tersebut ke tahap selanjutnya FPKS menyalsikan hilangnya frasa "dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah" sebagai dasar kewenangan penuntutan jaksa dalam Pasal 8 ayat (3) RUU Kejaksaan serta hilangnya rumusan norma pasal 17 RUU yang memberikan jaminan kesejahteraan yang adil dan layak bagi jaksa.

Lebih lanjut lagi, Fraksi PKS mencermati tiga poin utama yang menjadi sorotan dalam RUU Kejaksaan ini.

Pertama, mengenai definisi dan kedudukan kejaksaan yang harusnya seimbang. Kedua, tugas dan wewenang jaksa sebagai aparat penegak hukum harus didasarkan pada penghormatan HAM atau Hak Asasi Manusia, dan Terakhir, terkait ketentuan larangan rangkap jabatan bagi Jaksa dan Jaksa Agung demi menjaga fokus, profesionalitas dan imparsialitas dari penyandang profesi jaksa itu sendiri.

"Saat ini pemahaman dan praktek yang berkaitan dengan fungsi jaksa sebagai pengacara negara perlu direkonstruksi

ulang landasan konseptualnya agar selaras dengan sistem hukum nasional." Ujar Legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I Dalam penerapannya, RUU ini memperoleh legitimasinya secara 'genuine' atau tulus tidaklah lepas dari pandangan dan akomodasi yang diberikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyelesaikan perampungan RUU tersebut ke tahap selanjutnya.

Apalagi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga memperlihatkan adanya kelemahan dalam penormaan terkait masa jabatan Jaksa Agung sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan.

"Oleh karena itu, dengan proses penyusunan harmonisasi dan pembahasan RUU ini harus memperhatikan falsafah dari politik hukum ketatanegaraan sehingga perubahan yang diharapkan memiliki kesinambungan



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Anggota Komisi III DPR RI

Fraksi PKS mencermati tiga poin utama yang menjadi sorotan dalam RUU Kejaksaan ini. Pertama, mengenai definisi dan kedudukan kejaksaan yang harusnya seimbang. Kedua, tugas dan wewenang jaksa sebagai aparat penegak hukum harus didasarkan pada penghormatan HAM atau Hak Asasi Manusia, dan Terakhir, terkait ketentuan larangan rangkap jabatan bagi Jaksa dan Jaksa Agung demi menjaga fokus, profesionalitas dan imparsialitas dari penyandang profesi jaksa itu sendiri

dengan reformasi kejaksaan di Indonesia yang memiliki fungsi dan kedudukan yang khas dalam

sistem ketatanegaraan kita."
Jelas Ketua Mahkamah
Kehormatan Dewan DPR.

Harga Minyak Goreng Makin Melambung, Aleg PKS Desak Pemerintah **Prioritaskan** Produksi CPO Nasional

KUTIPAN

Jakarta (06/12) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mendesak pemerintah harus berani untuk menetapkan kuota tertentu dari produksi CPO (Crude Palm Oil) nasional untuk kepentingan domestik (dalam negeri).

Menurut Johan, hal tersebut perlu diadakan untuk memastikan agar produksi minyak goreng domestik mendapatkan proporsi kuota CPO yang lebih murah dari standar pasar dunia.

"Hal tersebut penting dilakukan sebab harga minyak goreng di pasaran domestik terus melambung akibat meningkatnya permintaan minyak nabati di pasar internasional," ujar Johan seraya menekankan ini adalah salah satu alternatif solusi untuk mengatasi mahalannya harga minyak goreng di pasaran.

Politisi PKS ini menyebut Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit (CPO) terbesar di dunia dengan

pertumbuhan rata-rata 3,61% per tahun.

"Namun disesalkan ternyata pabrik-pabrik minyak goreng tidak memiliki integrasi dengan produsen CPO, dampaknya mereka harus membeli CPO sesuai dengan harga pasar lelang dalam negeri, yang juga terkorelasi dengan harga pasar internasional, sehingga naiknya harga CPO berimplikasi naiknya harga minyak goreng," urai Johan.

Untuk mengatasi melambungnya harga minyak goreng, Johan mendorong pemerintah segera membuat kebijakan untuk menurunkan harga bahan baku utama minyak goreng sehingga berdampak akan menurunkan biaya

produksi dan akan berimplikasi menurunkan harga jual minyak goreng di dalam negeri.

"Saya minta pemerintah prioritaskan produksi CPO nasional untuk kepentingan dalam negeri dengan berbagai kebijakan dan intervensi agar bahan baku minyak goreng harganya lebih rendah dari standar pasar dunia," ujar Johan.

Legislator Senayan ini mengusulkan agar Pemerintah segera meningkatkan pajak ekspor CPO, yang akan menyebabkan jumlah yang akan diekspor menjadi berkurang dan akan meningkatkan suplai CPO domestik, serta hal ini akan berdampak menurunkan harga CPO domestik.

"Saya minta agar pemerintah lebih prioritaskan kebutuhan dalam negeri akan harga CPO yang lebih murah dan suplai CPO untuk kebutuhan domestik sebab ekspor kita sudah cukup besar yaitu total ekspor CPO tahun 2020 lalu mencapai 37,3 juta ton dengan market share global mencapai 55%," tutur Johan.

Wakil Rakyat dari Dapil NTB ini mengungkapkan bahwa

**H. JOHAN ROSIHAN, S.T**

Anggota Komisi IV DPR RI

"Atas situasi ini, saya berharap pemerintah harus tegas sebagai bentuk intervensi negara agar harga minyak goreng tidak melambung melebihi batas dari Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (HATK) sesuai dengan Permendag No. 7 tahun 2020,"

kebutuhan minyak goreng nasional mencapai 5,06 juta ton per tahun dengan harga yang semakin melambung akibat naiknya harga CPO yang mencapai 44,03% di pasaran.

"Atas situasi ini, saya berharap pemerintah harus tegas sebagai bentuk intervensi negara

agar harga minyak goreng tidak melambung melebihi batas dari Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (HATK) sesuai dengan Permendag No. 7 tahun 2020," cetus Johan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Legislator FPKS : Harga Minyak Goreng Naik, Pemerintah Perlu Pegang Kendali

KUTIPAN

Jakarta (03/12) – Anggota komisi IV DPR RI, Hermanto menyampaikan bahwa kenaikan harga minyak berdampak pada ketidakberdayaan pemerintah dalam mengontrol harga eceran tertinggi di pasaran. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kesempatan PKS Legislative Corner pada Jumat Siang (03/12/2021)

“harga minyak goreng melambung, rakyat berkabung salah satu bentuk bahwa pertarungan antar negara, korporat, dan Pasar” ungkap Hermanto

Sejak 1 November lalu, kenaikan harga minyak goreng menjadi perhatian khalayak luas, harga minyak mengalami kenaikan bahkan mampu melampaui harga eceran tertinggi. hal tersebut menjadi pembahasan yang kompleks.

“harga minyak goreng di pasar perlu untuk diperhatikan mengingat terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Dimana

sebelumnya harga minyak goreng 12.000 per liter sekarang mencapai harga 21.500 per liter” jelas Hermanto

Seperti yang diketahui bahwa dalam penentuan harga maka negara yang diwakilkan oleh “head” harus mampu mengontrol terkait dengan dinamika kenaikan harga, akan tetapi dalam realitasnya justru sebaliknya

“indoensia harus bisa memastikan sistem pengendali harga berfungsi dengan baik apabila tidak maka akan menyebabkan anomali yang

berujung pada ketidakberdayaan dalam pertarungan dengan pasar” ungkap Hermanto.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa masalah kenaikan harga minyak ini seharusnya menjadi titik balik indonesia agar dapat memasok ke pasar global guna mengendalikan harga minyak di pasaran.

“saat ini, beberapa negara seperti thailand, kanada, malaysia mengalami penurunan sehingga seharusnya indonesia lebih mampu meningkatkan, mengingat indonesia termasuk negara produsen minyak terbesar dalam pasar global” Tutup Hermanto.

Meski demikian, demi kesejahteraan masyarakat indonesia yang selalu mengkonsumsi minyak goreng, indonesia harus lebih dominan dan mengambil peluang guna mengembalikan kendali seperti di awal.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

“Masalah kenaikan harga minyak ini seharusnya menjadi titik balik indonesia agar dapat memasok ke pasar global guna mengendalikan harga minyak di pasaran. saat ini, beberapa negara seperti thailand, kanada, malaysia mengalami penurunan sehingga seharusnya indonesia lebih mampu meningkatkan, mengingat indonesia termasuk negara produsen minyak terbesar dalam pasar global”

Legislator PKS: Tak Impor Beras tahun 2021, Presiden Jokowi Kembali Lakukan Kebohongan Publik!

KUTIPAN

Politisi senior PKS ini juga menyangkan komentar presiden Jokowi yang dianggap melakukan sebuah kebohongan publik karena sudah seringkali kali mengklaim bahwa sejak 3 tahun terakhir Indonesia tidak pernah mengimpor beras.

Jakarta (02/12) -- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali telah melakukan kebohongan publik dengan mengatakan bahwa RI tidak impor beras pada tahun 2021 ini.

"Kita tidak ingin Presiden melakukan sebuah kebohongan publik karena sejatinya impor disaat stok beras cukup sama saja melakukan pengkhianatan kepada para petani lokal," tegasnya di Jakarta (1/1/2021).

Dikutip dari tempo.co, dalam kunjungan kerjanya Presiden Joko Widodo (Jokowi)

bersama Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan para petani melakukan penanaman padi di area kurang lebih 75 hektar di wilayah Trenggalek, Jawa Timur (30/11). Jokowi mengatakan hingga kini Indonesia belum melakukan impor beras.

"Kita tahu bahwa tahun ini tahun 2021 sampai hari ini kita belum melakukan impor beras sama sekali dan kenyataannya stok kita masih pada posisi yang sangat baik," ujarnya.

Menurut Slamet, data BPS tahun 2021 menunjukkan tahun 2018 Indonesia mengimpor 2,2 juta ton (US\$ 1

miliar), tahun 2019 impor 444 ribu ton (US\$ 184 juta), tahun 2020 impor 356 ribu ton (US\$ 195 juta), tahun 2021 impor 242 ribu ton (US\$ 110 juta). Padahal BULOG menyatakan stok beras di gudang BULOG cukup.

Politisi senior PKS ini juga menyangkan komentar presiden Jokowi yang dianggap melakukan sebuah kebohongan publik karena sudah seringkali kali mengklaim bahwa sejak 3 tahun terakhir Indonesia tidak pernah mengimpor beras.

Padahal faktanya impor beras hampir setiap tahun terjadi bahkan saat presiden menyatakan demikian, impor beras tahun 2021 sudah mencapai 242 ribu ton dengan nilai US\$ 110 juta.



dr. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

“Kita tidak ingin Presiden melakukan sebuah kebohongan publik karena sejatinya impor disaat stok beras cukup sama saja melakukan pengkhianatan kepada para petani lokal”

Apresiasi Kenaikan Ekspor Ikan

Aleg PKS: Rakyat Indonesia Jangan Sampai Kurang Protein

KUTIPAN

Jakarta (11/12) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengapresiasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mampu mengkolaborasi seluruh stakeholder perikanan sehingga mampu memberikan angka positif ekspor perikanan pada akhir 2021.

Capaian kinerja ekspor hasil perikanan mencapai USD 4,56 miliar dimana angka ini meningkat sebesar 6,6 persen dibanding periode yang sama pada 2020, menurut Akmal merupakan kinerja yang baik dan perlu di apresiasi.

Namun demikian, Akmal mengingatkan, meski kinerja ekspor perikanan menalami tren yang positif, pemerintah juga mesti memperhatikan kebutuhan dalam negeri terutama untuk memenuhi protein tiap penduduk Indonesia.

"Negara kita memang sangat kaya akan sumber

daya alamnya. Namun dengan melimpahnya pangan Nasional, jangan sampai penduduknya malah kekurangan. Perlu di ketahui, bahwa tiap penduduk Indonesia ini butuh protein 'rata-rata' sekitar 46 gram per hari untuk wanita, dan rata-rata 56 gram per hari untuk pria", jelas Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini berpendapat, bahwa program masyarakat gemar ikan yang sudah berjalan beberapa waktu lalu perlu di galakkan kembali. Program ini menurutnya sudah baik tapi masih kurang luas jangkauan-

nya dan kurang intensif.

"Masih banyak wilayah Indonesia yang masyarakatnya kurang menggemari mengkonsumsi ikan. Ini boleh jadi karena pada suatu daerah tertentu, harga ikan dirasa cukup mahal atau ketersediaannya sangat minim", ucap Akmal.

Politisi PKS ini mengungkapkan, bahwa perlu ada program-program pemerintah yang diinisiasi KKP, agar menggencarkan program dari penyediaan perikanan baik Budidaya maupun tangkap.

Akmal mengatakan, Sumberdaya Alam yang baik di negara ini belum diimbangi dengan cara mengeksplorasi secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan yang berkelanjutan.

"Saya berharap, prestasi bidang perikanan yang mampu meningkatkan ekspornya dapat dipertahankan. Namun jangan lupa, bahwa pelayanan negara kita kepada negara lain untuk tujuan keuntungan penerimaan negara, juga mesti di imbangi dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam negeri akan protein dari perikanan, sehingga rakyat negara ini tetap cerdas dan sekaligus melawan ancaman stunting yang hingga saat ini terus membayangi di beberapa daerah", tutup Andi Akmal Pasluddin.



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya berharap, prestasi bidang perikanan yang mampu meningkatkan ekspornya dapat dipertahankan. Namun jangan lupa, bahwa pelayanan negara kita kepada negara lain untuk tujuan keuntungan penerimaan negara, juga mesti di imbangi dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam negeri akan protein dari perikanan, sehingga rakyat negara ini tetap cerdas dan sekaligus melawan ancaman stunting yang hingga saat ini terus membayangi di beberapa daerah",

PKS TOLAK TDL NAIK



Karena daya beli masih rendah dan rakyat lagi susah

- Pemerintah mewacanakan penyesuaian tarif dasar listrik pada awal 2022 berdasarkan kesepakatan antara Kementerian ESDM dan Badan Anggaran (Benggar) DPR RI.
- Penyesuaian tersebut ditujukan bagi 13 golongan pelanggan listrik non-subsidi.



Faktor yang mempengaruhi kenaikan TDL:

- 1 Kenalkan harga jual batu bara di pasar internasional sempat mencapai USD 200/ton.
- 2 Nilai tukar rupiah terhadap dolar
- 3 Tingkat inflasi



Kenalkan TDL dapat memicu inflasi dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.



TDL Indonesia tergolong tinggi

- 🇮🇩 10 sen (USD)/kwh
- 🇲🇾 8,6 sen (USD)/kwh
- 🇵🇭 8,2 sen (USD)/kwh
- 🇸🇮 5,19 sen (USD)/kwh



Keputusan Pemindahan IKN yang Tergesa-gesa **Dikhawatirkan** Beban Keuangan Negara

KUTIPAN

Jakarta (11/12) — Pembahasan RUU IKN akan segera dimulai dimana terdapat beberapa isu penting dalam RUU IKN ini yang harus menjadi perhatian bersama.

Hamid Noor Yasin menyampaikan dalam draft RUU Ibu Kota Negara (IKN) ketentuan waktu pemindahan IKN yang diusulkan untuk ditetapkan pada Semester I tahun 2024, hal ini terkesan dipaksakan dan sangat tergesa-gesa karena kondisi ekonomi Indonesia dan dunia sedang tidak menentu akibat pandemi Covid-19.

“Apalagi Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Oktober 2021 sebesar Rp 6.687,28 triliun yang setara dengan 39,69 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Keputusan pemindahan IKN yang tergesa-gesa juga dikhawatirkan membebani keuangan negara, seperti halnya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang akhirnya membengkak sekitar Rp 27 T dan harus

mendapatkan suntikan dana APBN,” kata Hamid yang ditugaskan Fraksi PKS sebagai anggota Pansus IKN.

Kesan tergesa-gesa ini dikuatkan dengan fakta bahwa proses pembahasan di DPR juga lebih cepat dari biasanya, dimana fraksi-fraksi diminta mengirim DIM hanya 2 hari setelah mendapat input dari para ahli dan pakar.

“Selain itu draft RUU IKN yang disampaikan oleh Pemerintah kurang memberikan gambaran terhadap Ibu Kota Negara yang akan dibangun. Hal ini karena dalam ketentuan yang diusulkan disebutkan bahwa ketentuan mengenai Rencana Induk Ibu Kota Negara akan diatur dengan Peraturan Presiden,” kata Hamid, Anggota Komisi V DPR RI.

Hamid mengingatkan hal

ini berpotensi menyebabkan adanya ketidakjelasan dalam proses pembangunan dan pemindahan IKN yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan membengkaknya anggaran pemindahan Ibu Kota Negara.

“Oleh sebab itu, rencana pemindahan Ibu Kota Negara ini harus ditunda, mengingat keadaan keuangan negara sedang berat akibat utang yang terus menumpuk,” tegasnya.

Selain itu, RUU IKN ini juga harus mengikutkan Rencana Induk Ibu Kota Negara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan RUU IKN ini, hal ini guna mendapatkan kepastian terhadap gambaran Ibu Kota Negara yang akan dibangun beserta aspek-aspek lain yang menyertai, salah satunya adalah aspek keuangan.

“Sehingga kita mengajak masyarakat untuk turut mengawasi proses pembahasan RUU IKN ini, sebab saat ini PKS tidak bisa berjuang sendiri. Komposisi kursi koalisi pemerintah yang mayoritas, membuat PKS harus berkoalisi dengan masyarakat untuk menyuarkan ketidaktertanggungannya,” tutup Hamid.

**Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.**

Anggota Komisi V DPR RI

“RUU IKN ini juga harus mengikutkan Rencana Induk Ibu Kota Negara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan RUU IKN ini, hal ini guna mendapatkan kepastian terhadap gambaran Ibu Kota Negara yang akan dibangun beserta aspek-aspek lain yang menyertai, salah satunya adalah aspek keuangan”

Legislator PKS Minta **Revisi Perpres Rincian APBN 2022** Terkait Dana Desa

KUTIPAN

Jakarta (11/12) — Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 104 tahun 2021 tentang rincian APBN 2022 yang ditandatangani Presiden akhir November lalu.

Pada Pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan dukungan pendanaan penanganannya Covid-19 paling sedikit 8% (delapan persen).

Pada Dana Desa mengalami penurunan menjadi Rp 68 Triliun pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp 72 Triliun pada tahun 2021.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Ma'azat, meminta Pemerintah untuk merevisi Peraturan ini.

"Pemerintah mengubah sistem pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa, dari yang sebelumnya diberikan Rp 300.000 kepada Keluarga

Penerima Manfaat (KPM), sekarang sistemnya dipatok 40% dari Dana Desa. Ini dapat dilihat pada sesuai Pasal 5 ayat 4 poin a. Sistem ini membuat ketidakadilan. Akan dijumpai desa yang sedikit jumlah KPM, tetapi alokasinya sangat besar atau sebaliknya Desa yang KPM-nya banyak, tetapi karena terikat 40%, KPM tidak mendapat sebanyak tahun 2021 ini (Rp 300.000)", jelas Syahrul yang juga Ketua DPP PKS ini.

"Angka 40% ini jika mengambil dari bobot angka kemiskinan Desa pada Alokasi Dana Desa juga dipertanyakan, karena menurut data BPS Juli 2021, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2020 sebesar 13,20 persen, turun menjadi 13,10 persen pada Maret 2021

dan jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 145,0 ribu orang (dari 15,51 juta orang pada September 2020 menjadi 15,37 juta orang pada Maret 2021)", tambahnya.

Syahrul mengingatkan kewenangan Desa dalam mengelola desanya jangan sampai dikebiri oleh Pusat.

"Pemerintah dapat melakukan pengawasan intensif atas penyaluran bantuan, bukan malah mengubah sistem untuk keefektifan dalam pemulihan ekonomi," jelas Anggota DPR RI dari Dapil Riau I

"Di samping itu, tren penurunan angka Covid-19 dapat dijadikan tolak ukur sampai kapan bantuan ini dan modifikasi bantuan sosial kepada KPM agar menggerakkan mereka menjadi lebih produktif dan berkelanjutan. Sehingga juga dapat ditinjau kembali sistem pengaturan persentase 8% untuk penanganan Covid-19, padahal ada desa yang sudah hijau beberapa bulan terakhir dan sebaliknya ada desa yang masih berjuang warga desanya dalam Covid-19", terang Syahrul yang juga orang desa dari Kampar.



Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Komisi V DPR RI

"Penurunan dana desa tahun 2022 yakni senilai 68 triliun dari sebelumnya sampai 72 triliun, harus benar-benar dialokasikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat"

"Penurunan dana desa tahun 2022 yakni senilai 68 triliun dari sebelumnya sampai 72 triliun, harus benar-benar dialokasikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Membangun desa dengan padat karya, mengokohkan BUMDesa

yang menjadi ujung tombak peningkatan kesejahteraan desa agar menjadi prioritas yang terus dimaksimalkan oleh Pemerintah", tutup Syahrul Aidi Ma'azat yang merupakan seorang Doktor ini.

Aleg PKS: Pembangunan Kualitas SDM di Perbatasan Tak Kalah Penting dengan Infrastruktur

KUTIPAN

Tasikmalaya (30/11) -- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat membenarkan bahwa pembangunan jalan perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan proyek strategis Pemerintah.

Pasalnya, kata Toriq, infrastruktur sepanjang 1.832 kilometer tersebut akan memperkuat pertahanan dan keamanan negara.

"Ribuan Kilometer jalan perbatasan Kalimantan yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah proyek yang sangat vital. Infrastruktur ini akan mendukung pertahanan dan keamanan negara sekaligus membangun jalur logistik baru," ujar Politisi PKS ini.

Menurut Toriq Jalur Logistik sangatlah penting karena keberadaannya akan mendukung pertumbuhan embrio pusat perekonomian dan konektivitas masyarakat.

Untuk daerah terpencil, Jalan perbatasan diharapkan dapat membuka keterisolasian dan membantu masyarakat di kawasan tersebut.

"Daerah perbatasan umumnya memiliki sumber daya alam yang melimpah. Contohnya perbatasan NTT yang memiliki perkebunan pohon kayu putih, kelor, dan jambu mete. Ketersediaan jalan perbatasan memiliki manfaat penting untuk jalur logistik komoditas masyarakat setempat," sebutnya.

Kendati demikian, Toriq ingatkan, selain pembangunan infrastruktur pemerintah juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi perbatasan. "Harus ada

keberlanjutan ekonomi maka pemerintah harus pastikan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan," tuturnya.

Toriq menyebutkan bahwa peningkatan kualitas SDM adalah faktor kunci dalam membangun kawasan perbatasan. Pasalnya, sebagaimana disebutkan oleh salah satu kepala daerah disana, SDM di wilayah Indonesia kalah jauh dengan yang dimiliki oleh negara tetangga, yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam.

"SDM ini juga untuk kebutuhan jangka panjang dan tak kalah penting dengan pembangunan infrastruktur yang juga terus digenjut. SDM yang berkualitas akan meminimalisir disparitas harga antara wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga yang memacu maraknya transaksi ilegal," tutupnya.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

Jalur logistik sangatlah penting karena keberadaannya akan mendukung pertumbuhan embrio pusat perekonomian dan konektivitas masyarakat. Untuk daerah terpencil, Jalan perbatasan diharapkan dapat membuka keterisolasian dan membantu masyarakat di kawasan tersebut.



Terima
Kasih

44K

SUBSCRIBERS



**PKSTV
DPR RI**

Politisi PKS Ingatkan DPR Agar Tidak Tergesagesa Bahas RUU IKN

KUTIPAN

Menurut Suryadi, Susunan komposisi keanggotaan Pansus RUU IKN didasarkan pada pertimbangan dan pemerataan anggota tiap fraksi, dan juga tingkat kompleksitas pembahasan sehingga total anggota pansus berjumlah 56 orang.

Jakarta (09/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menanggapi Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang telah dibentuk untuk segera membahas terkait pemindahan Ibu Kota.

Menurut Suryadi, Susunan komposisi keanggotaan Pansus RUU IKN didasarkan pada pertimbangan dan pemerataan anggota tiap fraksi, dan juga tingkat kompleksitas pembahasan sehingga total anggota pansus berjumlah 56 orang.

"Namun demikian jumlah ini melebihi ketentuan yang telah diatur pada Pasal 104 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang

Tata Tertib," ungkap pria yang akrab disapa SJP ini

Selain jumlah anggota pansus yang melebihi ketentuan, kata SJP, proses pembahasan RUU IKN juga terkesan terburu-buru padahal masalah yang dibahas pada RUU ini cukup kompleks.

"Sehingga butuh waktu untuk melakukan pembahasan agar dapat menampung lebih banyak masukan dari masyarakat. Beberapa substansi yang harus dikritisi adalah terkait pilihan lokasi pemindahan Ibu Kota Negara ke daerah Penajam Paser Utara, kemudian juga pemilihan waktu pemindahan, mekanisme pemindahan serta bentuk pemerintahan IKN dan masalah pembiayaan," pungkas Anggota

Komisi V DPR RI ini
Oleh sebab itu, tegas Suryadi, Fraksi PKS berpendapat agar pembahasan RUU IKN ini jangan dilakukan secara tergesa-gesa, dan harus melibatkan masyarakat luas.

"Jangan sampai terjadi kembali kejadian seperti UU Cipta Kerja yang pada akhirnya diputuskan oleh MK untuk harus diperbaiki karena kurang melibatkan partisipasi publik," tandas Anggota DPR dari Dapil NTB ini.



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.

Anggota Komisi V DPR RI

"Selain jumlah anggota pansus yang melebihi ketentuan, proses pembahasan RUU IKN juga terkesan terburu-buru padahal masalah yang dibahas pada RUU ini cukup kompleks. Sehingga butuh waktu untuk melakukan pembahasan agar dapat menampung lebih banyak masukan dari masyarakat. Beberapa substansi yang harus dikritisi adalah terkait pilihan lokasi pemindahan Ibu Kota Negara ke daerah Penajam Paser Utara, kemudian juga pemilihan waktu pemindahan,

Rapat Bersama Menteri BUMN

Anggota FPKS Minta Pemerintah Cermat Lakukan IPO

KUTIPAN

Jakarta (02/12) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak meminta pelaksanaan penawaran umum perdana (Initial Public Offering-IPO) saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke depan benar-benar harus dilakukan secara cermat dan melalui kajian matang.

Hal itu, ungkap Amin, agar pelepasan saham itu membuat BUMN lebih sehat dan hasil IPO betul-betul bisa menjadi modal perusahaan untuk lebih berkembang.

Amin menanggapi rencana IPO yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI, Kamis (02/12).

Sejumlah BUMN akan melaksanakan IPO dalam waktu dekat. Diantaranya PT Waskita Karya, PT Pertamina Geothermal, PT ASDP, PT Krakatau Steel, PT Bank BTN, PT Bank BNI, dan PT SIG (Semen Indonesia).

Menurut Amin, IPO

sejumlah BUMN perlu kajian secara matang sebelum melepasnya ke pasar saham, termasuk anak atau cucu usaha. Kajian yang cermat akan memberikan dampak positif bagi perusahaan.

"Rencana IPO anak dan cucu usaha Pertamina sebaik dikaji lebih mendalam untuk diidentifikasi plus minus IPO, baik bagi Pertamina maupun anak dan cucu usaha itu sendiri," ujarnya.

Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu menilai, Pertamina dan BUMN lainnya harus melakukan pemilihan secara cermat terhadap model bisnis anak atau cucu usaha yang

akan dilepas ke pasar saham. Pertamina, lanjutnya, semestinya membatasi pada upaya melepas anak dan cucu usaha yang non core business atau di luar bisnis inti Pertamina.

"IPO mestinya hanya menasar pada anak dan cucu usaha yang bukan bisnis inti," ucapnya.

Selain itu, kata Amin, BUMN harus mempunyai rencana aksi yang konkret pasca IPO anak dan cucu usaha yang di luar inti bisnis tersebut.

Jangan sampai dana segar yang masuk tidak optimal pemanfaatannya, oleh karena itu secara cermat dibuat langkah-langkah strategis dalam memanfaatkannya.

"Dana segar yang didapatkan akan digunakan untuk apa saja, apakah untuk kebutuhan investasi pada bisnis hulu dan hilir, pembayaran utang jatuh tempo, dan lain sebagainya," lanjutnya.

Selain itu, kata Amin, BUMN juga perlu mengidentifikasi besaran saham anak dan cucu usaha yang akan dilepas secara hati-hati.

"Harus diidentifikasi mana

**AMIN AK, M.M.**

Anggota Komisi VI DPR RI

"IPO sejumlah BUMN perlu kajian secara matang sebelum melepasnya ke pasar saham, termasuk anak atau cucu usaha. Kajian yang cermat akan memberikan dampak positif bagi perusahaan."

anak usaha yang akan dilepas sepenuhnya 100 persen atau masih ada anak usaha yang mesti dikuasai, misalnya hingga 51 persen," ungkapnya.

Amin berharap langkah IPO sebaiknya menjadi momentum restrukturisasi dan perampingan anak hingga cucu usaha di BUMN

yang begitu banyak.

"Saya mendorong anak dan cucu usaha yang berbeda inti bisnis dengan induk usaha menjadi bagian dari kepemilikan publik melalui IPO sehingga aspek pengawasan akan lebih optimal," tegas Amin.

Raker dengan Menteri BUMN

Aleg PKS Minta Pemerintah Awasi Ketat Kinerja Perusahaan yang Akan IPO

KUTIPAN

Jakarta (04/12) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina se usai rapat kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN berkaitan dengan rencana Initial Public Offering (IPO) dan Right ISSUE BUMN tahun 2021 - 2022,

menerangkan Kementerian BUMN harus serius memperhatikan timing dan kondisi yang tepat, termasuk mempertimbangkan BUMN yang masih memiliki prospek yang baik.

"Kami di Komisi VI, menekankan agar Kementerian BUMN dapat memaparkan dengan rinci dan detail rencana strategis yang jelas terkait masing-masing IPO sebelum pelaksanaannya. Salah satu persoalan dalam BUMN terkait IPO adalah mekanisme pelepasan sahamnya. Dalam RUU BUMN yang sedang digodok di DPR, pelepasan saham yang tidak mengakibatkan privatisasi tidak perlu mendapat persetujuan DPR", ujar Nevi.

Nevi mengatakan, dengan

krusialnya pelaksanaan IPO oleh perusahaan plat merah ini, Kementerian BUMN mesti mampu memperhitungkan dengan baik pelaksanaan IPO dan Right issue sehingga menarik dan mendapat dukungan maksimal dari publik maupun investor serta menghasilkan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi perusahaan negara ini.

Politisi PKS ini juga memaparkan salah satu hasil keputusan rapat di Komisi VI adalah, Kementerian BUMN dapat dengan segera memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai BUMN yang sudah go publik namun belum memiliki kinerja optimal. Selain itu, tambahanya, Kementerian

BUMN diminta melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan setidaknya setahun setelah IPO dilakukan.

"Saat ini, komisi VI telah mendukung Kementerian BUMN untuk melepaskan perusahaan dan anak perusahaan BUMN dengan penghasilan di bawah 50 milyar rupiah kepada pengusaha Nasional. Untuk itu, Pemerintah melalui Kemeneq BUMN mesti segera melakukan pemaparan dan penjelasan kepada komisi VI terkait dukungan yang sudah diberikan", ujar Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat ini mengatakan, saat ini masih ada yang perlu di perbaiki pola komunikasi antara Kementerian BUMN dengan DPR terutama pada pengelolaan BUMN yang mendapat sorotan publik. Ia menjelaskan, untuk menghindari polemik di tengah masyarakat, pengelolaan BUMN mesti jelas dan transparan karena perusahaan ini milik negara yang mesti dioptimalkan untuk melayani kepentingan rakyat banyak.



Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

“Dengan krusialnya pelaksanaan IPO oleh perusahaan plat merah ini, Kementerian BUMN mesti mampu memperhitungkan dengan baik pelaksanaan IPO dan Right issue sehingga menarik dan mendapat dukungan maksimal dari publik maupun investor serta menghasilkan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi perusahaan negara ini.”

"Saya mengingatkan betul bahwa, proses Right Issue yang dilakukan di tahun 2021 ini, harus mengantisipasi adanya saham Negara yang terdilusi

akibat proses ini. Dikemudian hari, Kementerian BUMN harus melakukan berbagai skenario untuk melindungi saham Negara", tutup Nevi Zuairina



Aleg PKS: Peran BUMN Dalam Penanggulangan Bencana Semeru Diharapkan Cepat dan Tepat

KUTIPAN

Jakarta (08/12) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rafli menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting dalam tanggap bencana di Indonesia, seperti bencana erupsi gunung Semeru dan banjir yang tengah melanda sejumlah daerah di tanah air.

"Peran BUMN, ada pada setiap penanggulangan bencana alam dan non alam, mereka terus menyalurkan bantuan dalam berbagai bentuk, saat ini musibah erupsi gunung semeru yang tengah menimpa masyarakat Lumajang sekitarnya kita ajak pihak BUMN cepat memberi bantuan," ungkap Aleg Komisi VI.

Kendati demikian Rafli berharap kegiatan penyaluran tersebut diawasi agar tepat sasaran.

"Langkah cepat sudah terlihat dilakukan sejumlah peru-

sahaan BUMN ketika bencana terjadi. Saat ini bukan hanya semeru, penyaluran bantuan korban banjir di sejumlah tempat ditanah air, perlu juga kita awasi bersama agar bantuan disalurkan betu-betul tepat sasaran" Ujar Rafli S

Kita turut berduka, atas bencana demi bencana yang sedang menimpa negeri ini, ditengan kondisi beginilah kita praktekkan filsafat kehidupan saling bahu membantu sesuai azas pancasila.



RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI

"Langkah cepat sudah terlihat dilakukan sejumlah perusahaan BUMN ketika bencana terjadi. Saat ini bukan hanya semeru, penyaluran bantuan korban banjir di sejumlah tempat ditanah air, perlu juga kita awasi bersama agar bantuan disalurkan betu-betul tepat sasaran"



Mari Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Fraksi PKS DPR RI Tolak Kenaikan Tarif Dasar Listrik pada Awal Tahun 2022

KUTIPAN

Jakarta (06/12) --- Fraksi PKS DPR RI menolak rencana Pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) di awal tahun 2022.

Menurut Wakil Ketua FKPS DPR, Mulyanto, sekarang bukan saat yang tepat bagi Pemerintah menaikkan TDL mengingat daya beli masyarakat masih rendah akibat dampak pandemi Covid-19.

Mulyanto menambahkan kalangan pengusaha dan industri juga menolak rencana kenaikan TDL ini.

"Mereka merasa keberatan karena baru saja menerima kewajiban menaikkan batas upah minimum. Para pengusaha merasa kondisi perdagangan dan industri saat ini masih belum stabil," tegas Mulyanto.

Mulyanto menyebut Pemerintah harusnya peka dengan kesulitan yang dialami masyarakat. Dengan kondisi sekarang saja banyak masyarakat mengeluh dengan besarnya beban pengeluaran yang harus ditanggung. Apalagi nanti kalau TDL akan naik.

Dengan demikian

Mulyanto merasa sekarang bukan saat yang tepat bagi Pemerintah melaksanakan penyesuaian tarif listrik ini.

"Pandemi kan belum selesai, bahkan kita kini dihantui varian baru Covid-19, yang diduga daya sebarinya lebih cepat, yakni varian Omicron. Alih-alih memperpanjang stimulus listrik, Pemerintah malah berwacana untuk menaikkan tarif listrik," kata Mulyanto.

Mulyanto mengingatkan kenaikan TDL dapat memicu kenaikan inflasi. Dan inflasi akan melemahkan daya beli masyarakat, kemudian secara langsung akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Mulyanto melihat sedikitnya ada tiga variabel yang mempengaruhi besaran tarif listrik yakni nilai kurs dolar, inflasi dan harga batu bara. Dari ketiga variabel itu, kenaikan harga batu bara di pasar internasional

diduga menjadi dasar utama rencana Pemerintah menaikkan TDL. Saat ini harga jual batu bara sempat menembus angka USD 200/ton.

Sementara 70 persen pembangkit listrik di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara.

Namun demikian Mulyanto melihat Pemerintah punya instrumen lain agar TDL ini tidak naik meskipun harga batu bara melambung. Pemerintah dapat memperketat aturan domestic market obligation (DMO) agar pasokan batu bara bagi PLN tetap terjaga dengan harga yang terjangkau. Harga DMO batu bara, khususnya untuk pembangkit listrik, saat ini dipatok maksimal USD70 per ton.

"Dibanding negara tetangga, tarif listrik Indonesia juga tidak terlalu murah. Dari data Globalpetrolprice.com per maret 2021, tarif listrik di Indonesia untuk pelanggan rumah tangga sebesar USD 10.1 sen. Sementara di China, Vietnam dan Malaysia masing-masing sebesar USD 8.6, 8.3 dan 5.2 sen. Bahkan tarif listrik rumah tangga di Laos hanya



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

“Sekarang bukan saat yang tepat bagi Pemerintah melaksanakan penyesuaian tarif listrik ini. Pandemi kan belum selesai, bahkan kita kini dihantui varian baru Covid-19, yang diduga daya sebarinya lebih cepat, yakni varian Omicron. Alih-alih memperpanjang stimulus listrik, Pemerintah malah berwacana untuk menaikkan tarif listrik

sebesar USD 4.7 sen. Jadi tarif listrik di kita hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tarif listrik di Malaysia,” ungkap Mulyanto.

Mulyanto juga memperlakukan sikap Pemerintah yang melaporkan rencana kenaikan TDL itu ke Badan Anggaran DPR

RI. Menurutny sikap Pemerintah itu tidak tepat karena seharusnya rencana kenaikan TDL itu dibicarakan dulu di Komisi VII DPR RI yang berwenang mengawasi sektor energi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Komisi VIII Minta KND Bikin Road- map Permasalahan Disabilitas

KUTIPAN

Jakarta (03/12) — Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis minta Komisi Nasional Disabilitas (KND) segera membuat peta kerja atau roadmap untuk mengakomodasi kebutuhan dan permasalahan penyandang disabilitas.

Hal ini menyusul pelantikan tujuh komisioner KND oleh Presiden Joko Widodo kemarin di Jakarta.

"Mereka harus mendaata dan menginventarisir kebutuhan disabilitas, dan anggaran buat mereka," ujarnya kepada reporter Tirta, Kamis (2/12/2021).

Menurut Iskan ketersediaan data akan menjadi pegangan KND dalam kerjakerja mengawasi Kemensos. Sebagaimana yang tertera dalam UU Penyandang Disabilitas, posisi KND melekat pada Kemensos.

"Dia [KND] kan bermitra dengan komisi VIII, kalau misalnya dia [Kemensos] nggak

respons, kan bisa kami tegur juga, dan anggarannya bisa digeser juga," tukasnya.

Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan keanggotaan pertama KND di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada 1 Desember 2021.

Pelantikan keanggotaan KND dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas.



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II

“Ketersediaan data akan menjadi pegangan KND dalam kerjakerja mengawasi Kemensos. Sebagaimana yang tertera dalam UU Penyandang Disabilitas, posisi KND melekat pada Kemensos. Dia [KND] kan bermitra dengan komisi VIII, kalau misalnya dia [Kemensos] nggak respons, kan bisa kami tegur juga, dan anggarannya bisa digeser juga”

Aleg PKS **Dukung** Keberpihakan Menag pada Nasib Guru Madrasah Honorer dan Revitalisasi Percetakan Alquran

KUTIPAN

Jakarta (01/12) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mendorong keberpihakan Menteri Agama terhadap nasib guru madrasah honorer dan guru yang telah tersertifikasi namun tidak kunjung memperoleh insentif.

Bukhori mengaku dirinya menerima banyak aspirasi dari para guru maupun asosiasi seperti Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang mengeluhkan soal masalah penyetaraan gaji, tunjangan, hingga kurikulum.

“Para guru honorer dan guru yang sudah tersertifikasi tapi tidak kunjung ter-insentif adalah persoalan yang perlu menjadi prioritas pemerintah. Kiprah mereka dalam berkhidmat ada yang sudah mencapai puluhan tahun dalam mendidik namun dipaksa bertahan dalam taraf hidup yang mengkhawatirkan lantaran

tidak kunjung memperoleh kepastian. Negara semestinya memahami, dengan membantu memecahkan masalah mereka merupakan bagian dari upaya mengembangkan SDM sekaligus wujud apresiasi negara terhadap profesi pendidik,” terang Bukhori saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta (30/11/2021).

Politisi sekaligus dosen ini meminta pemerintah tidak memandang sebelah mata keluhan para guru madrasah honorer yang jumlahnya mencapai ratusan ribu tersebut.

Dirinya berharap pemerintah, utamanya Kementerian Agama, segera menindaklanjuti aspirasi para guru dengan mengambil kebijakan prioritas yang solutif dalam memecahkan permasalahan mereka.

Masih dalam kesempatan sama, Legislator Dapil Jawa Tengah 1 ini turut menyinggung rencana Kementerian Agama untuk merevitalisasi Unit Percetakan Quran (UPQ) menuju taraf internasional yang menargetkan olah cetak sebanyak 10 juta eksemplar per tahun. Terkait hal itu, Bukhori menyatakan dukungan penuh atas rencana tersebut.

Anggota Komisi Agama ini menjelaskan, dengan melihat jumlah populasi muslim di Indonesia yang mencapai 225 juta jiwa, setidaknya dibutuhkan empat hingga lima juta eksemplar mushaf Alquran per tahun untuk mencukupi kebutuhan nasional. Namun sayangnya, kapasitas UPQ saat ini belum mencapai angka tersebut.



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

“Secara prinsip kami mendukung penuh dan dukungan ini sebenarnya telah lama kami sampaikan sejak kunjungan kami ke UPQ di Ciawi Kabupaten Bogor pada 24 Juli 2020 silam. Saat itu kami mengusul-kan agar sarana dan prasarana UPQ perlu ditingkatkan seperti peremajaan mesin cetak yang mesti memenuhi standar percetakan canggih, perluasan lahan, hingga pembenahan dan pengembangan SDM”

HNW Desak Guru Pemerkosanya Santriwati Dihukum Terberat dan Izin Operasional Pesantren Dicabut

KUTIPAN

Jakarta (10/12) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mendesak agar guru yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap lebih dari 12 santriwati di bawah umur di Bandung, Jawa Barat, agar dihukum terberat dengan ancaman hukuman maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Mendengar terulangnya kejahatan yang terkutuk ini, yang menabrak hukum Negara dan hukum Agama, sudah sangat selayaknya pelaku dihukum dengan pemberatan apakah dengan hukum kebiri, atau hukuman pidana seumur hidup, bahkan hukuman pidana mati," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (10/12).

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa dasar hukum untuk menjatuhkan

hukuman dengan pemberatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

HNW menjelaskan selain mengatur hukuman kebiri, aturan tersebut juga memuat

hukuman pidana seumur hidup dan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menunjuk Pasal 81 UU yang mengesahkan Perppu Kebiri tersebut. Ketentuan itu berbunyi, 'Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.'

Sedangkan Pasal 76D berbunyi, 'Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.'

"Salah satu syarat untuk



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Ini harus diusut secara tuntas, mengapa bisa terjadi bukan sekali dua kali, tetapi terhadap lebih dari 12 korban. Dan dalam rentang waktu sampai 5 tahunan? Seandainya sikap tegas Kemenag itu dilakukan sejak lebih awal, kemungkinan korbananya akan tak sebanyak yang sekarang ini,"

menjatuhkan hukuman maksimal sudah terpenuhi, karena korbananya adalah anak-anak dibawah umur yang diduga lebih dari satu, yakni ada 12 malah

ada yang menyebutkan 21 santriwati," tukasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS Sebut Dukungan Kemenag Terhadap Permen-dikbudristek No. 30 Tahun 2021 Lukai Umat Islam

KUTIPAN

Jakarta- Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. menegur Menteri Agama atas pernyataan Kemenag yang disampaikan melalui Sekjend, terkait dukungan terhadap Permendikbudristek No. 30 tahun 2021.

Nur Azizah menyebutkan, dukungan terbuka itu telah melukai banyak umat Islam. Hal itu disampaikan Nur Azizah dalam Agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Anggota Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama pada Selasa (30/11) di Gedung Nusantara II Komplek DPR/MPR RI Senayan, Jakarta.

Nur Azizah sebutkan, aturan ini sebetulnya mirip dengan RUU PKS yang sebelumnya oleh Komisi VIII sudah di tolak. "Intinya permendikbud itu, kan kalau kegiatan seksual itu terpaksa itu gak boleh. Kemudian efeknya, kalau suka sama-suka itu boleh. Tentu itu sangat melukai umat Islam tentunya", jelas Nur Azizah. Ia menyebutkan, saat ini

masalah yang ia temui di dapil, juga terkait perilaku LGBT dan hubungan seks diluar nikah sudah sangat merajalela. "Apalagi dengan dikeluarkannya Permen-dikbudristek No. 30 Tahun 2021 ini dan di dukung oleh Kemenag, ini akan seperti apa selanjutnya?", kata Nur Azizah.

Nur Azizah menegaskan bahwa pada Raker Kemenag dengan Eselon satu pada tanggal 27 bulan September 2021, dirinya sudah menyampaikan bahwa Kemenag adalah Sokoguru Agama seluruh rakyat Indonesia, yang diharapkan bisa mengantarkan seluruh rakyat Indonesia ke surga. "Itu sudah saya sampaikan saat raker lalu, tapi kok belakangan saya lihat Kemenag justru

malah mendukung Permen-dikbudristek no. 30", imbuhnya.

Menurut Nur Azizah, semua anggota DPR/MPR yang sejak awal-awal dilantik sudah mengikuti dan secara rutin di dapil menyampaikan sosialisasi empat pilar MPR RI. Ada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Dalam sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, jelas di sana bangsa Indonesia harus menyembah tuhanNya, beribadah menurut agama dan kepercayaannya, melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya. Itu diantara intisari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sehingga yang jelas, tegas Nur Azizah, Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 ini menyala-hi Pancasila. Dan tentu sebagai-mana sudah disampaikan pak Menteri, ada UPQ yang nantinya akan mencetak ribuan Al-Qur'an, dimana tentu saya sangat gembira dengan pencetakan ini, tapi mudah-mudahan isi Al-Qur'an ini juga dapat dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Bagi yang beragama Islam, sudah jelas dalam surah



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"Bagi yang beragama Islam, sudah jelas dalam surah Al-kahfi ayat 103 sampai 106 tentu ini menjadi kewaspadaan kita semua, di ayat ini kalau kita perhatikan, supaya tidak hanya kemenag tapi kita semua harus hati-hati, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang seronok kemudian kita menanggapi itu perbuatan yang baik"

Al-kahfi ayat 103 sampai 106 tentu ini menjadi kewaspadaan kita semua, di ayat ini kalau kita perhatikan, supaya tidak hanya kemenag tapi kita semua harus hati-hati, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang seronok kemudian kita menanggapi itu perbuatan yang baik. Sehingga

Kemenag perlu kembali menimbang dan mengklarifikasi atas dukungan tersebut. Karena pada dasarnya tidak hanya umat Islam, tapi semua agama yang diakui di Indonesia tidak ada yang menghendaki perzinahan", pungkas Nur Azizah.

Tanggapi Kasus Guru Perkosa Santriwati

Aleg PKS: **Selamatkan Santriwati dan Nama Baik Pesantren**

KUTIPAN

Jakarta (15/12) — Anggota DPR Komisi VIII dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat menyatakan, pemerkosaan terhadap lebih dari 12 santriwati dibawah umur oleh seorang guru bernama Herry Wirawan (36),

yang juga disebut sebagai pemimpin pesantren Tahfidz Madani di Bandung Jawa Barat hingga beberapa korban hamil, harus ada tindakan tegas aparat dan penegak hukum untuk menyelamatkan santriwati yang menjadi korban dan juga santriwati yang lainnya.

"Peristiwa yang terulang dengan kasus yang sejenis mencoreng umat Islam. Seolah pesantren menjadi tempat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sehingga harus ada langkah penyelamatan terhadap umat, khususnya para santriwati yang mengikuti pendidikan di pesantren yang sebenarnya, bukan sekolah berkedok pesantren," pungkasnya.

Pesantren, kata Surahman, tidak ada

hubungannya dengan kejahatan pelaku pemerkosaan yang memiliki moral yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islami dan akhlak Islam.

"Pesantren adalah institusi pendidikan yang sudah memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara Indonesia, jangan sampai dengan kasus ini mencoreng nama baik pesantren yang selama ini sudah baik di pandangan umat Islam," terangnya.

Para penegak hukum, imbuah Surahman, yaitu Polisi Kejaksaan dan juga MUI sebagai wadah aspirasi umat meningkatkan kewenangannya untuk menjaga dan menyelamatkan umat dari pemahaman sesat pelaku dan

harus dilakukan pengusutan secara tuntas, sehubungan dengan pemahaman pelaku yang menyimpang.

Lebih lanjut, Surahman menegaskan bahwa pelaku harus dihukum dengan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan juga penegak hukum dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

"Peraturan perundangan tersebut dapat digunakan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga bagi orang lain yang akan melakukan hal yang sejenis," tegas Surahman.

Pemerintah, imbuhnya, juga harus serius dalam melindungi segenap warganya.

"khususnya perlindungan terhadap anak yang semakin hari semakin banyak terjadi di negara kita ini," pungkas Surahman mengakhiri.



Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Peristiwa yang terulang dengan kasus yang sejenis mencoreng umat Islam. Seolah pesantren menjadi tempat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Sehingga harus ada langkah penyelamatan terhadap umat, khususnya para santriwati yang mengikuti pendidikan di pesantren yang sebenarnya, bukan sekolah berkedok pesantren,"



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kreatif Atraktif Substantif



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Selamat & Sukses



**Muktamar Ke-34
Nahdlatul Ulama**

Menuju Satu Abad NU: Membangun Kemandirian
Warga untuk Perdamaian Dunia.

Lampung, 22-23 Desember 2021

**Semoga Membawa
kemaslahatan bagi
umat dan Bangsa**

Varian Omicron Merebak Politisi PKS Minta Perlindungan PMI di Hongkong

KUTIPAN

Jakarta (30/11) — Kasus Covid-19 varian Omicron mulai merebak di Afrika, Eropa, Asia dan Australia. Salah satu negara melaporkan kasus omicron adalah Hongkong.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah RI juga memperhatikan perlindungan bagi WNI khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hongkong.

Saat ini lebih dari 170 ribu PMI bekerja di Hongkong. Mayoritasnya perempuan dan bekerja di sektor informal.

"Varian Omicron masuk dalam Variant of Concern (VOC) karena memiliki tingkat penularan tinggi. Sebab itu Pemerintah harus memperhatikan teman-teman PMI di sana dimulai dari sosialisasi tentang kewaspadaan terhadap varian Omicron," ujar Mufida dalam keterangannya, Selasa (29/11/2021).

Selain dibarengkan

informasi kewaspadaan terhadap varian omicron ke seluruh PMI, perlu juga disosialisasikan aturan larangan masuk sementara dari Hongkong ke Indonesia yang baru saja diterbitkan.

Ia meminta KJRI mendata siapa saja PMI yang mungkin kontraknya habis dan harus pulang ke Indonesia saat ini kemudian memberikan bantuan shelter sementara.

"Bagi yang seharusnya pulang tapi kemudian terbit aturan pembatasan ini harus diantisipasi oleh KJRI terutama mungkin bagi mereka yang habis kontrak. Jangan sampai tidak terurus di negeri orang," sebut Mufida.

Mufida juga mempertanyakan sejauh mana cakupan

vakasini PMI di Hongkong hingga saat ini. Ia menyebut perlu juga dipastikan seluruh PMI mendapatkan dukungan terkait akses protokol kesehatan dan vaksin.

"Bagaimana cakupan vakasini untuk PMI di Hongkong harus ada laporan. Vakasini yang digelar KJRI Hongkong awal Agustus lalu hanya menjangkau 266 orang. Kita harapkan sudah lebih dari 70 persen juga teman-teman PMI di Hongkong sudah mendapatkan vaksin. Varian Omicron kan masih terus diteliti jadi yang se-maksimal bisa kita lakukan, kita lakukan sejak awal," ungkap Pembina Sahabat Migran ini.

Mengenai pengetatan kembali jalur masuk ke Indonesia dari negara-negara yang terindikasi sudah ada varian Omicron, Mufida mendukungnya. Apalagi bertepatan dengan momentum libur Natal dan Tahun Baru.

"Tinggal implementasinya di lapangan harus ketat, minimalisir kebocoran seperti saat dulu outbreak Delta di India, kita bocor di mana-mana. Kita harus mempertahankan situasi pengendalian Covid dengan implementasi dan pengawasan aturan yang tegas ini," papar Mufida.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

"Bagaimana cakupan vakasini untuk PMI di Hongkong harus ada laporan. Vakasini yang digelar KJRI Hongkong awal Agustus lalu hanya menjangkau 266 orang. Kita harapkan sudah lebih dari 70 persen juga teman-teman PMI di Hongkong sudah mendapatkan vaksin. Varian Omicron kan masih terus diteliti jadi yang se-maksimal bisa kita lakukan, kita lakukan sejak awal,"

AIDS pada Kalangan Anak Muda Tinggi,

Aleg PKS: Strategi Fast Track Pemerintah Belum Signifikan

KUTIPAN

Jakarta (02/12) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani prihatin dengan tingginya kasus Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Indonesia

Kementerian Kesehatan melaporkan, jumlah kasus AIDS mengalami peningkatan 22,78% dari 7.036 pada 2019 menjadi 8.639 pada 2020.

Tingginya kasus AIDS di Indonesia, kata Netty, sangat mengkhawatirkan. Bahkan untuk periode Januari-Maret 2021 saja sudah ada 1.607 kasus AIDS yang dilaporkan.

"Strategi Fast Track 90-90 yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2017 belum berdampak signifikan terhadap turunnya angka penderita AIDS." Kata Netty dalam keterangan media, Rabu (02/12/2021).

Sejak tahun 2017, imbuh Netty, Pemerintah telah mencanangkan strategi Fast Track 90-90-90 yang meliputi percepatan pencapaian 90%

orang yang mengetahui status HIV melalui tes atau deteksi dini; 90% dari ODHA yang mengetahui status HIV memulai terapi ARV; 90% ODHA dalam terapi ARV berhasil menekan jumlah virusnya sehingga mengurangi kemungkinan penularan HIV, serta tidak ada lagi stigma dan diskriminasi ODHA.

Netty mendorong agar pemerintah terus menggalakkan kampanye kesehatan reproduksi terutama untuk kalangan anak muda.

"Terus galakkan kampanye kesehatan reproduksi bagi remaja, say no to free sex, say no to nikah dini, say no to drugs dan sebagainya. Untuk mengantisipasi AIDS, perlu juga ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, komunitas,

dan masyarakat sipil sehingga menghasilkan kebijakan yang mempermudah akses terhadap layanan kesehatan," katanya.

Berdasarkan laporan Kemenkes, kasus AIDS di Indonesia didominasi kelompok umur 20-29 tahun dengan persentase tertinggi (31,9%), kemudian diikuti kelompok umur 30-39 tahun (31,3%), 40-49 tahun (14,2%), dan 50-59 tahun (5,5%).

"Jika tidak segera ditekan, tingginya kasus AIDS di kalangan anak muda ini akan mengancam upaya untuk mewujudkan Indonesia sehat dan Indonesia emas tahun 2045. Suluh, Temukan, Obati dan pertahankan (STOP) jangan hanya jadi slogan yang nyaring terdengar di kalangan masyarakat perkotaan. Akan tetapi, juga harus mampu sampai dan menyentuh level terbawah masyarakat khususnya di desa-desa yang luput dari perhatian," ungkap Netty mengakhiri.

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

"Jika tidak segera ditekan, tingginya kasus AIDS di kalangan anak muda ini akan mengancam upaya untuk mewujudkan Indonesia sehat dan Indonesia emas tahun 2045. Suluh, Temukan, Obati dan pertahankan (STOP) jangan hanya jadi slogan yang nyaring terdengar di kalangan masyarakat perkotaan. Akan tetapi, juga harus mampu sampai dan menyentuh level terbawah masyarakat khususnya di desa-desa yang luput dari perhatian"

Pembatalan PPKM Level 3 Nataru

Legislator PKS **Sayangkan** Labilnya Pemerintah

KUTIPAN

Jakarta (08/12) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin, menyayangkan kebijakan pemerintah yang labil disaat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3 untuk menanggulangi penularan Covid-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru belum dilakukan.

"Padahal pemerintah sudah mengumumkan kebijakan PPKM level 3 jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga masyarakat dan sejumlah instansi seperti perkantoran dan sekolah sudah bersiap juga dengan kebijakan tersebut agar sejalan dengan PPKM Level 3 Nataru" Tulis Alifudin dalam keterangannya, Selasa (7/12/2021).

Alifudin khawatir kebijakan yang berubah-ubah akan membuat masyarakat menjadi bingung. Walaupun peraturan diserahkan ke wilayah masing-masing, Alifudin tetap menghimbau agar aktifitas diluar rumah yang menimbulkan kerumunan supaya dihindari.

"Kami khawatir masyarakat bingung dan lebih memilih

tidak aware terhadap kebijakan pembatasan, dan nantinya akan terjadinya kerumunan yang berskala besar, jangan sampai kita kecolongan di tahun 2022 karena kasus akan melonjak" tambah Bang Alif sapaan akrabnya.

Alifudin melihat belum ada data pasti soal heard imunity atau kekebalan kelompok, karena cakupan vaksinasi juga masih belum sepenuhnya merata, dan belum ada pernyataan pemerintah bahwa Indonesia sudah masuk fase kekebalan kelompok. Seharusnya pemerintah membuat kebijakan berdasarkan data dan melibatkan pakar kesehatan serta epidemiolog sehingga kebijakan yang diterapkan

dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau masyarakat abai atas kebijakan ini, maka yang repot semua, dalam mengambil kebijakan apakah sudah melibatkan ahli? Apalagi perubahan ini membuat banyak masyarakat bingung dan menjadi berprasangka atas pilihan kasihnya pemerintah terhadap kebijakan ini" kata Alifudin.

Alifudin menambahkan bahwa, vaksinasi sebenarnya lebih diutamakan, pasalnya vaksinasi dosis ke 2 di seluruh Indonesia belum mencapai 70%. Jika sudah tercapai target, baru kita bicara soal pelonggaran.

"Kita masih lebih banyak di jawa-bali saja yang capaian vaksinasinya tinggi, diluar jawa bali masih kurang, maka vaksinasi harus digalakan" tambah alif.

Sebelumnya, Menko Marnes Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia pada libur Nataru resmi dibatalkan. Namun belakangan diganti dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Masa Nataru (Natal dan tahun baru) dan menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

**H. ALIFUDIN, S.E., M.M**

Anggota Komisi IX DPR RI

"Kami khawatir masyarakat bingung dan lebih memilih tidak aware terhadap kebijakan pembatasan, dan nantinya akan terjadinya kerumunan yang berskala besar, jangan sampai kita kecolongan di tahun 2022 karena kasus akan melonjak"

"Pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah menjelang

momen Natal dan Tahun Baru (Nataru)," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (6/12).



PKS

#Tetap
Jaga
Prokes

Indonesia
Mulai Membaik

Terima Kasih
#Nakes Pahlawan
Bangsa

Anggota Komisi X FPKS Desak Pemerintah Penuhi Kewajiban Pada Penyandang Disabilitas

KUTIPAN

Jakarta (03/12) --- Lima tahun sudah Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disahkan, namun implementasinya masih menjadi PR besar bagi pemerintah.

"Hadirnya Undang-Undang No 8 Tahun 2016 telah memberi paradigma baru dalam memandang para penyandang disabilitas, dari paradigma belas kasihan (charity-based) menjadi paradigma pemenuhan hak (human right-based). Ada 22 hak bagi para penyandang disabilitas yang tertera dalam Undang-Undang ini namun implementasi untuk mewujudkannya ternyata sangat lambat, diantaranya terkait hak pendidikan." Kata anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah.

Untuk mendukung pemenuhan hak pendidikan para penyandang disabilitas, salah satu amanat dari Undang-Undang No 8 Tahun 2016 ini adalah kewajiban penyediaan Akomodasi yang Layak dan

penyediaan Unit Layanan Disabilitas sejak tingkat dasar, menengah hingga pendidikan tinggi.

Pasal 1 Ketentuan Umum pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 menyebutkan Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Sementara Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

"Akomodasi yang layak serta Unit Layanan Disabilitas

ini tentu menjadi pendukung utama kegiatan pendidikan inklusif di setiap jenjang pendidikan, yang memungkinkan para penyandang disabilitas memiliki kesetaraan hak dalam memperoleh pendidikan. Sebaliknya kelambatan penyediaan akomodasi yang layak serta Unit Layanan Disabilitas tentu saja menghambat pula para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak pendidikannya." Jelas Ledia.

Penyediaan Akomodasi dan Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan dilakukan oleh penyelenggara pendidikan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemda. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pada jenjang pendidikan tingkat dasar dan menengah, sementara pada tingkat pendidikan tinggi fasilitasnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini menjadi tanggung jawab Menteri terkait.

Hal ini berkesesuaian dengan PP No 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang secara



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

"Saya minta Mas Menteri bersegera melaksanakan amanah-amanah pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait langsung dengan kewenangannya. Sementara dengan Pemda pun perlu secara intens melakukan komunikasi dan koordinasi agar para penyandang disabilitas dari setiap jenjang pendidikan bisa terpenuhi hak pendidikannya. Jangan abai dan jangan ditunda-tunda."

husus pada pasal 3 dan pasal 20 menyebutkan tanggung jawab Menteri untuk memfasilitasi penyediaan akomodasi yang layak dan pembentukan Unit Layanan

Disabilitas pada pendidikan tinggi yang menjadi kewenangannya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS Nilai Kebijakan Afirmasi Penerimaan PPPK Belum Berpihak pada Guru Disabilitas

KUTIPAN

Palu (03/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri menanggapi kebijakan afirmasi penerimaan PPPK atau guru honorer yang belum berpihak pada Guru Disabilitas tepat di Hari Disabilitas Internasional, Jum'at, (03/12).

Siapapun dari masyarakat Indonesia, kata Sakinah, memiliki hak yang sama untuk menjadi guru, pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Termasuk para masyarakat penyandang disabilitas berhak untuk menjadi pendidik.

"Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan pada pasal 10 bahwa penyandang disabilitas mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan," ujar Politikus perempuan Partai Keadilan Sejahtera Komisi X DPR RI

disela-sela kunjungan kerjanya di Jawa Barat.

Guna memberikan akses yang luas bagi guru penyandang disabilitas pada seleksi calon aparat sipil negara (ASN), imbuhnya, untuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maka diperlukan komitmen dari Pemerintah untuk memberikan akses yang luas bagi mereka.

"Sarana dan prasarana pada sistem seleksi PPPK bagi guru yang menyandang status disabilitas harus terus dikembangkan supaya lebih memudahkan bagi mereka dalam mengikuti perekrutan guru PPPK," ungkap Legislator PKS Dapil Sulawesi Tengah.

Pada pelaksanaan

rekrutmen guru PPPK bagi penyandang disabilitas masih menghadapi kendala terkait dengan teknis yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Proses seleksi PPPK bagi guru penyandang disabilitas diberlakukan sama dengan guru non disabilitas.

"Metode ujiannya pun harus juga ramah bagi mereka para guru penyandang disabilitas. Mereka memiliki kelebihan masing-masing, namun tidak bisa disamakan dengan yang normal. Harus mendapatkan perhatian khusus bagi mereka," tutur Sekretaris Jendral Wanita Islam Alkhairaat (WIA) pusat.

Dalam Juknis pelaksanaan seleksi Guru PPPK No. 3767/B.B1/HK.01.03/2021 tidak disebutkan tata cara test bagi penyandang disabilitas. Padahal jika mengacu pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan proses rekrutmen bagi penyandang disabilitas. Diantaranya pada pasal 47 Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat menyediakan asistansi dalam

**Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag**

Anggota Komisi X DPR RI

"Sarana dan prasarana pada sistem seleksi PPPK bagi guru yang menyandang status disabilitas harus terus dikembangkan supaya lebih memudahkan bagi mereka dalam mengikuti perekrutan guru PPPK

proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan, menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Penduduk kita yang menyandang disabilitas mayoritas bekerja pada sektor non formal. Tentu bagi para guru yang menyandang status disabilitas memiliki kesempatan

yang sama seperti halnya mereka yang normal dalam seleksi penerimaan PPPK.

"Dan tentu kita terus mendorong Pemerintah untuk lebih memberikan kemudahan akses bagi guru-guru penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," pungkasnya.

Anggota FPKS: UU Cipta Kerja Seharusnya Inkonstitusional Tanpa Syarat

KUTIPAN

Jakarta (29/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati memberikan tanggapan terhadap keputusan Mahkamah Konsultasi (MK) bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam kurun 2 tahun ke depan.

"Apresiasi kepada keputusan MK yang sejalan dengan perjuangan PKS bersama masyarakat yang sedari awal tegas menolak RUU Omnibuslaw Cipta Kerja yang disahkan menjadi UU ini," ungkap Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini.

Keputusan MK ini juga menunjukkan bahwa betapa gegabah dan terburu-burnya Pemerintah dalam membahas dan menyetujui UU tersebut,

sehingga mengabaikan prosedur penyusunan yang selama ini digunakan dalam setiap penyusunan UU.

"Apalagi UU Cipta Kerja sendiri merupakan OmnibusLaw yang membatalkan sejumlah pasal dalam banyak UU terkait. Dari awal PKS sudah mengingatkan persoalan yang akan muncul jika UU ini tetap disahkan," ujarnya.

Selain itu Anggota DPR RI Komisi XI ini menilai ironi

keputusan MK terkait inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja bukan tanpa sebab, pasalnya UU Cipta Kerja beserta PP turunannya telah diberlakukan terhadap proyek strategis nasional.

"Ironinya karena masih diberi kesempatan untuk berjalan hingga 2 tahun, maka selama itu dampak negatif akan terus meluas dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan hidup," katanya.

Anis mengingatkan kembali mengenai cacatnya substansi UU Cipta Kerja tentang muatan pengaturan yang tidak adil bagi nasib pekerja atau buruh Indonesia serta memihak kepada investor atau pemilik modal.

"tercermin dalam perubahan pasal-pasal berkaitan hubungan pekerja-pengusaha, upah dan pesangon yang terbukti belakangan ini dengan gelombang demo akibat tingkat kenaikan upah dibawah kenaikan inflasi meskipun itu baru dari satu faktor," tegasnya.

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini mengingatkan juga cacat prosedur dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja.

"MK pun menyatakan diantaranya partisipasi publik yang rendah seperti sulitnya akses terhadap naskah akademik dan perubahan penulisan terhadap substansi persetujuan bersama oleh DPR dan presiden, dan lainnya," tambahnya. Legislator dari Partai



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

"Keputusan MK ini juga menunjukkan bahwa betapa gegabah dan terburu-burnya Pemerintah dalam membahas dan menyetujui UU tersebut, sehingga mengabaikan prosedur penyusunan yang selama ini digunakan dalam setiap penyusunan UU. "

Keadilan Sejahtera ini menyampaikan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin membesar kalau tidak bijak dalam mengambil keputusan mengenai UU Cipta Kerja yang berdampak kepada ekonomi nasional.

"Kalau mau berpihak dan tegas ya cabut UU Cipta Kerja dengan Perppu, efeknya jelas akan terasa di kondisi pandemi ini apalagi jika aksi mogok para buruh di awal bulan benar-benar terjadi," tuturnya.

Tidak Setuju “Re-sentralisasi” Fiskal, FPKS Tolak RUU HKPD

KUTIPAN

Jakarta (07/12) — Rapat Paripurna ke-10 berlangsung di Gedung DPR RI pada Selasa, 7 Desember 2021.

Salah satu agendanya adalah pembahasan atau pengambilan keputusan tingkat II atas Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Dalam kesempatan ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menjadi satu-satunya fraksi yang menolak RUU HKPD.

Diwakili oleh Ahmad Junaidi Auly, Anggota Panja (Panitia Kerja) RUU HKPD, FPKS menegaskan kembali penolakannya.

Junaidi Auly menyebutkan bahwa Keputusan MPR Nomor X/MPR/1998 dan Keputusan MPR Nomor XV/MPR/1998, yaitu membangun otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, adalah salah satu dasar dalam Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD).

“RUU HKPD ini diharapkan menjadi sebuah desain

untuk perbaikan masalah ketimpangan dan kemandirian fiskal, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera” paparnya.

Dalam proses pembahasan RUU HKPD, Anggota Komisi XI khususnya yang tergabung dalam Panitia Kerja melakukan berbagai korespondensi dengan stakeholders.

Fraksi PKS menyampaikan aspirasi bahwa terjadi banyak penolakan oleh Pemerintah Daerah (pemda), baik pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten atas RUU HKPD.

“Semangat otonomi daerah tidak terlihat dalam RUU HKPD, karena justru cenderung memperkuat resentralisasi oleh pemerintah pusat. Inovasi pengelolaan fiskal dalam rangka pembangunan daerah

dikebiri, dengan banyaknya program pembangunan yang harus ‘disetir’ atas nama Program Strategis Nasional (PSN). Padahal Faktanya, tidak semua prioritas nasional sejalan dengan kebutuhan daerah” lanjut Junaidi Auly.

Fraksi PKS menyoroti hilangnya klausula batas minimal pagu DAU sebesar 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Hilangnya batas minimal pagu DAU meningkatkan ketidakpastian atas DAU yang akan diterima oleh daerah. Artinya bahwa salah satu instrumen penting dalam mengatasi ketimpangan fiskal daerah tidak lagi diakomodir dalam RUU HKPD. Karena tujuan utama DAU adalah pemerataan kemampuan keuangan atau mengurangi kesenjangan fiskal di setiap daerah di Indonesia” Junaidi Auly melanjutkan.

Fraksi PKS konsisten memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun pada pembahasan RUU HKPD, usulan FPKS mengenai keberpihakan terhadap Rakyat Kecil dengan pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk kendaraan roda 2 dengan CC kecil ditolak.

“Pembebasan kewajiban atas pembelian kendaraan bermotor ber-CC rendah akan



Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

“Semangat otonomi daerah tidak terlihat dalam RUU HKPD, karena justru cenderung memperkuat resentralisasi oleh pemerintah pusat. Inovasi pengelolaan fiskal dalam rangka pembangunan daerah dikediri, dengan banyaknya program pembangunan yang harus ‘disetir’ atas nama Program Strategis Nasional (PSN). Padahal Faktanya, tidak semua prioritas nasional sejalan dengan kebutuhan daerah”

meringankan beban hidup rakyat terlebih dimasa pandemi. Hal ini sangat penting sebagai kebijakan dengan semangat keadilan ditengah intensif pembebasan pajak untuk pembelian

kendaraan roda empat yang sedang diobral pemerintah dan banyaknya insentif pajak untuk korporasi” Pungkas Junaidi Auly.

Aleg PKS: RUU IKN Bukan Jawaban Kesenjangan Ekonomi

KUTIPAN

Jakarta (10/12) --- Anggota Pansus RUU IKN DPR RI Ecky Awal Muharam menanggapi pendapat umum RUU IKN bahwasanya pemindahan ibukota bukanlah jawaban atas kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan Luar Jawa.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pansus Ibu Kota Negara DPR RI dengan Para Pakar yang diadakan secara langsung pada Kamis lalu (9/12/2021)

Pemindahan Ibu kota saat ini menjadi isu krusial yang perlu diketahui oleh khalayak luas, mengingat RUU IKN tersebut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat.

"Pemilihan Ibu Kota merupakan bentuk membangun sebuah peradaban, sehingga perlu analisis yang lebih mendalam seperti manfaat, biaya sosial, modal sosial. Sejauh ini RUU IKN belum memenuhi sekaligus belum bisa diterima" Ujar Legislator PKS

Berdasarkan pemaparan dari para pakar dari perspektif

sosial kemasyarakatan dan masyarakat adat, dapat disimpulkan bahwa terdapat perencanaan terkait dengan konteks biaya riil yang belum matang.

"Berdasarkan penguatan No.6 dikatakan bahwa daerah pemilihan ibukota harus aman dari bencana geografis, sehingga pemindahan ibukota tetap saja memiliki berbagai risiko" Pungkas Ecky.

Seperti yang diketahui bahwa tujuan dari adanya RUU IKN pada dasarnya menjadi solusi adanya kesenjangan antara pulau jawa dan luar jawa akan tetapi saat ini indonesia mengalami defisit primer yang tidak seimbang yang dikarenakan oleh Pandemi Covid-19.

"Pemindahan Ibukota

tidak dipaksakan, mengingat saat kita perlu fokus pada pemulihan ekonomi yang mungkin saja memakan waktu sampai 5 tahun mendatang" Ujar Ecky

Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa perlu perencanaan yang matang guna mencapai kesejahteraan umum sehingga segalanya menjadi tepat sasaran dan di waktu yang tepat.

"Dan Jikalau Pemilihan Ibu Kota tetap dilaksanakan, maka lembaga dan kantor yang dipusat pada akhirnya akan kembali ke Pulau Jawa lagi mengingat terdapat unsur historis didalamnya" Pungkas Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Saat ini, RUU IKN masih menimbulkan berbagai pertanyaan yang sulit untuk dijawab, mengingat sejak awal momen RUU IKN masih belum tertata dan terencana dengan baik.

**H. ECKY AWAL MUCHARAM**

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Pemilihan Ibu Kota merupakan bentuk membangun sebuah peradaban, sehingga perlu analisis yang lebih mendalam seperti manfaat, biaya sosial, modal sosial. Sejauh ini RUU IKN belum memenuhi sekaligus belum bisa diterima" Ujar Legislator PKS"

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Baleg FPKS **Pertanyakan** Tafsir Pemerintah bahwa Tak Satupun Pasal UU Ciptaker Dibatalkan MK

KUTIPAN

Jakarta (01/12) — Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta Pemerintah jangan membuat tafsir sendiri terkait putusan MK tentang pembatalan UU Cipta Kerja.

Pemerintah, kata Mulyanto, harusnya menghormati dan mengikuti amar putusan MK secara utuh dan tidak memaksakan kehendak untuk tetap menjalankan UU Cipta Kerja (Ciptaker) tersebut.

Mulyanto menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa UU Ciptaker saat ini masih berlaku karena tidak ada satu pasal pun yang dibatalkan, tidak seluruhnya tepat.

"Saya tidak sependapat dengan penafsiran Pemerintah tersebut. Kita perlu cermat dan utuh dalam membaca teks keputusan MK dimaksud," kata mantan Anggota Panitia Kerja UU Ciptaker dari PKS tersebut.

Mulyanto menjelaskan amaran MK sudah sangat jelas minta kepada pembentuk UU untuk

mereview dan merevisi UU Ciptaker secara materil saat melakukakan proses pembentukan kembali UU Ciptaker secara formil.

"Selain itu, MK memerintahkan Pemerintah untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas bagi masyarakat, untuk menghindari dampak yang lebih besar dari pemberlakuan UU Ciptaker," jelas Mulyanto.

Ini artinya, kata Mulyanto, secara tersirat, ada masalah dengan pasal-pasal UU Ciptaker secara materil.

Alasannya adalah pertama putusan MK yang ada adalah bersifat formil. MK tidak ditak atau belum melakukan uji materil terhadap UU Ciptaker.

"Jadi memang MK tidak

memutuskan pasal-pasal tertentu untuk dibatalkan. Dengan demikian pernyataan, 'bahwa tidak ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK' adalah tidak relevan," kata Mulyanto.

Kedua, MK memerintahkan agar terkait hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas bagi masyarakat, agar aturan dalam UU Ciptaker untuk ditanggukkan.

"MK memang secara eksplisit tidak membatalkan UU ini secara materil, namun terkait hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas, MK memerintahkan agar pemberlakuan UU Ciptaker ditanggukkan, untuk menghindari dampak yang lebih besar dalam masyarakat", lanjut Mulyanto.

Mulyanto mengutip Pertimbangan Hukum No. [3.20.5] halaman 414 MK yang menyatakan: 'Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

"Amar MK sudah sangat jelas minta kepada pembentuk UU untuk mereview dan merevisi UU Ciptaker secara materil saat melakukan proses pembentukan kembali UU Ciptaker secara formil."

strategis dan berdampak luas agar ditanggukkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksanaan baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut'.

Kemudian dibegal ditegaskan dalam Amar Putusan No.7 halaman 417: 'Menyatakan untuk

menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)'.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Legislator PKS Usulkan RUU Tindak Pidana Kesusilaan Masuk Prolegnas Prioritas 2022

KUTIPAN

Jakarta (6/12) — Legislator PKS, Bukhori Yusuf menyampaikan catatan Fraksi PKS dalam rapat kerja Badan Legislasi dengan pemerintah dan DPD RI terkait prolegnas prioritas tahun 2022 pada Senin siang (6/12/2021).

Mewakili Fraksi PKS, ada setidaknya 3 catatan yang disampaikan oleh Bukhori dalam kesempatan tersebut, pertama tentang keputusan MK terkait UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"UU cipta kerja ini memang membawa niat baik, namun karena pembahasannya dalam waktu yang singkat dan padat sehingga terkesan mengesampingkan hal-hal lain yang tidak dapat dipenuhi. Proses pembentukan produk undang-undang harus dilakukan berdasarkan asas penyusunan UU yang memperhatikan, mendengarkan dan berpihak pada rakyat," Ujar Anggota Komisi VIII menegaskan bahwa asas

pembentukan UU bukan hanya sekedar formalitas.

Kedua, Bukhori menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih dalam kondisi prihatin di tengah pandemic Covid-19. Terlebih lagi munculnya isu varian baru, Omicron, yang semakin mengkhawatirkan.

"Di tengah kondisi ini, sudah sepatutnya semua potensi harus diutamakan untuk menyelamatkan anak-anak bangsa sembari memulihkan ekonomi negara. Sehingga, bila menimbang waktu, pembahasan RUU (Ibu Kota Negara) IKN dianggap tidak relevan karena ada hal mendesak lain yang perlu diperhatikan," Sahut Anggota

Baleg tersebut.

Catatan ketiga berisi tentang 29 RUU yang diusulkan oleh Fraksi PKS, dua RUU yang disampaikan oleh Bukhori dalam kesempatan tersebut adalah RUU tentang Bank Makanan dan RUU Tindak Pidana Kesusilaan. RUU Bank Makanan ini dimaksudkan untuk memayungi pendistribusian sisa makanan lembaga, LSM, dan filantropi untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Kami mengusulkan RUU Tindak Pidana Kesusilaan sebagai komparasi terhadap RUU TPKS. Kami menilai RUU TPKS tidak menjangkau aspek kebebasan seksual (free sex) dan penyimpangan seksual (LGBT) sehingga perlu ada payung hukum yang lebih komprehensif," Jelas Bukhori.

Lebih lanjut, putusan MK No. 46 pada Desember 2017 telah menyetujui tuntutan AILA terkait uji materi pasal-pasal kesusilaan terkait perzinahan dan LGBT. Di sisi lain, DPR sebagai legislator memang memiliki wewenang untuk menyusun UU.



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Badan Legislasi DPR RI

"Kami mengusulkan RUU Tindak Pidana Kesusilaan sebagai komparasi terhadap RUU TPKS. Kami menilai RUU TPKS tidak menjangkau aspek kebebasan seksual (free sex) dan penyimpangan seksual (LGBT) sehingga perlu ada payung hukum yang lebih komprehensif."

Masih Mengusung Paradigma Sexual Consent

Aleg PKS Tegas Tolak RUU PKS Sebagai RUU Inisiatif DPR

KUTIPAN

Jakarta (10/12) --- Fraksi PKS DPR RI menolak Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai usul inisiatif DPR.

Anggota Badan Legislasi Fraksi PKS Bukhori Yusuf menilai RUU tersebut masih mengusung paradigma Sexual Consent (persetujuan seksual).

Dalam penjelasannya, Bukhori menyebut walaupun RUU TPKS telah menyiapkan frasa iman dan takwa serta akhlak mulia dalam asasnya dan juga telah menambahkan klausul dalam poin 'Menimbang' bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan norma agama dan norma budaya, namun pihaknya tetap memandang di dalam seluruh rangkaian RUU TPKS sejatinya masih mengusung paradigma Sexual Consent.

"Fraksi PKS mengapresiasi pimpinan dan anggota panja yang telah mengakomodir beberapa usulan kami terkait materi muatan RUU TPKS.

Kendati demikian, kami tetap menyayangkan bahwa usulan kami agar ditambahkan rumusan pasal baru yang berbunyi: 'Ketentuan Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 harus sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, norma agama, dan budaya bangsa' tidak diakomodasi," papar Bukhori di Jakarta, Kamis (09/12/2021)

Anggota Komisi VIII DPR ini menilai, sejumlah pasal yang disebutkan itu merupakan isu sentral yang memicu multitafsir dan kontroversi di tengah masyarakat, sehingga PKS memandang perlu untuk menambahkan rumusan pasal tambahan dengan tujuan untuk menenangkan suasana kebatinan masyarakat dan memastikan mereka dapat menangkap itikad baik dari RUU

TPKS, yakni untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan seksual.

"Namun demikian, ketika pasal-pasal tersebut tidak dikunci dengan rumusan pasal tambahan sebagaimana yang telah PKS usulkan, maka berpotensi menimbulkan multitafsir karena dianggap melegalkan perzinahan dan penyimpangan seksual," papar Bukhori.

Lebih lanjut, Legislator Dapil Jawa Tengah 1 ini juga menilai dasar pemidanaan dalam RUU TPKS masih menggunakan tolak ukur hanya pada ada atau tidaknya kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 6, 7, 8) sehingga tidak komprehensif untuk menjangkau tindak penyimpangan seksual.

"Dengan demikian, hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan saja yang dapat dipidana menurut RUU ini. Akibatnya, perbuatan seksual yang dilakukan di luar perkawinan yang sah, termasuk penyimpangan seksual, yang dilakukan tanpa kekerasan



KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Badan Legislasi DPR RI

"Dasar pemidanaan dalam RUU TPKS masih menggunakan tolak ukur hanya pada ada atau tidaknya kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 6, 7, 8) sehingga tidak komprehensif untuk menjangkau tindak pidana perzinahan dan penyimpangan seksual. Dengan demikian, hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan saja yang dapat dipidana menurut RUU ini.

maupun ancaman kekerasan, atau dengan kata lain atas dasar persetujuan (consent), maka tidak dapat dipidana oleh RUU TPKS karena pengaturannya tidak menjangkau hal tersebut.

Karena alasan itu, kami memandang RUU TPKS masih mengadopsi paradigma Sexual Consent," tegasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

BURT Apresiasi Program Jamkes-tama di RS Hermina Manado

KUTIPAN

Manado (30/11) --- Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah mengapresiasi RS Hermina sebagai rumah sakit provider yang menjalankan program jaminan kesehatan utama (Jamkestama) bagi anggota DPR RI bersama keluarganya.

"Kami mengapresiasi rumah sakit Hermina sebagai rumah sakit provider Jasindo yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi anggota DPR RI yang notabene merupakan Peserta Jamkestama," ujar Dimiyati dalam pertemuan Tim Kunker BURT dengan Jasindo, perwakilan RS Hermina Manado, di Sulawesi Utara, Senin (29/11/2021).

Hal tersebut, bisa dilihat dari pelayanan yang diberikan RS Hermina Manado. Salah satunya melalui pendampingan yang dilakukan oleh pihak RS terhadap Anggota DPR RI atau keluarganya yang membutuhkan pelayanan

kesehatan. Begitupula dengan fasilitas-fasilitasnya, RS ini dirasa sangat cukup melayani peserta jamkestama.

Meski demikian politisi Fraksi PKS ini berharap agar ada penambahan infrastruktur di RS Hermina (terutama yang terkait dengan jamkestama). Seperti penambahan kamar-kamar perawatan, termasuk kamar VIP dan VVIP dan fasilitas lainnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**DR. H. R. A. DIMYATI
NATAKUSUMAH, SH, MH**

Wakil Ketua BURT DPR RI

"Kami mengapresiasi rumah sakit Hermina sebagai rumah sakit provider Jasindo yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi anggota DPR RI yang notabene merupakan Peserta Jamkestama



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri

Anggota DPR-RI dari PKS Diah Nurwitasari **Layat dan Santuni** Keluarga Korban Longsor Pasirjambu

KUTIPAN

Kabupaten Bandung (30/11) --- Anggota DPR-RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari melayat ke keluarga korban bencana longsor di Kampung Cukang Genteng Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung, kemarin.

Saat itu Diah Nurwitasari yang sedang melakukan kunjungan kerja di Baleendah, ketika mendengar laporan tersebut ia menyempatkan diri untuk meluncur ke lokasi bencana dan memberikan bantuan serta mendukung moril keluarga korban.

Longsor tersebut terjadi, Jum'at (27/11/21) seminar pukul 21.30 . Akibat longsor itu satu rumah di RT 01/01 Cukqnggenteng yang dihuni satu keluarga tertimbun.

Penghuni rumah seorang balita, Amelia (2,5 tahun) meninggal dunia., sedangkan kedua orangtuanya Nandi(23) dan Nur(20) menderita luka ringan dan dirujuk ke rumah sakit terdekat.

Diah Nurwitasari yang

sedang melakukan kunjungan kerja di Baleendah, dan beberapa relawan PKS ketika mendengar laporan tersebut sempatkan diri melayat Korban.

Amalia sudah dimakamkan, sedangkan kedua orang tuanya menempati rumah kerabat mereka yang tidak jauh dari rumah korban.

Ketika dilayat Diah, Nur ibunda almarhum Amelia terlihat masih terbaring lemas dengan kondisi psikis yang lemah. Dengan mata berkaca Diah menguatkan hati keluarga korban agar bersabar.

"Banyak zikir ya, Teh.

Semua di dunia ini hanya titipan Allah dan akan kembali kepada Allah, termasuk almarhum Dede Amel. Insha Allah ada hikmah

dan pahala besar jika kita bisa tabah dan sabar," ucap Diah.

Diah mengingatkan, bahwa anak yang meninggal ketika masih bayi atau balita, akan menjadi tabungan dan menunggu kita di surga kelak.

Diah memberikan bantuan langsung kepada korban dan sebagian dititipkan di posyandu setempat yang untuk sementara difungsikan untuk posko bantuan bagi korban terdampak.

Usai melayat keluarga korban, Diah ditemani ketua RT setempat meninjau reruntuhan rumah korban. Menurut Ketua RT, Dodi kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya namun tidak separah ini.

Diah mengimbau warga yang menempati rumah-rumah terdekat dengan rumah korban sebaiknya dievakuasi.

"Sebaiknya rumah-rumah ini segera dikosongkan untuk menghindari musibah yang serupa, dan tolong segera didata. Insha Allah saya bantu untuk segera diperbaiki dari program Rutilahu pemerintah." pungkas Diah.



Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat II

"Sebaiknya rumah-rumah ini segera dikosongkan untuk menghindari musibah yang serupa, dan tolong segera didata. Insha Allah saya bantu untuk segera diperbaiki dari program Rutilahu pemerintah"



Andi Akmal Mengkenalkan Menanam Pohon Pada Generasi Muda Sejak Dini

KUTIPAN

Dijelaskan AAP, panggilan akrab Andi Akmal, bahwa pohon memiliki banyak manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya, yakni sebagai penghasil oksigen. “Dengan menjaga dan merawat kelangsungan pohon, sebagai upaya kita mencegah dampak perubahan iklim yang kini jadi perhatian dunia,” kata AAP.

Kabupaten Bone (30/11) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin melalui peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia yang diperingati setiap tanggal 28 November setiap tahunnya, mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk lebih peka dan peduli lingkungan.

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS ini, bahwa kesadaran untuk menjaga lingkungan, harus ditanamkan sejak dini. Salah satunya, menanam dan merawat pohon.

“Generasi muda merupakan generasi penerus

bangsa. Kesadaran terhadap lingkungan, akan memperkuat pemikirannya untuk meneruskan keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini secara berkualitas. Kita mulai dengan cara sederhana, yakni melakukan praktik lapang dengan menanam pohon”, urai Akmal.

Dijelaskan AAP, panggilan akrab Andi Akmal, bahwa pohon memiliki banyak manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya, yakni sebagai penghasil oksigen.

“Dengan menjaga dan merawat kelangsungan pohon, sebagai upaya kita mencegah

dampak perubahan iklim yang kini jadi perhatian dunia,” kata AAP.

Dengan upaya menjaga kelestarian pohon, lanjut Andi Akmal, juga sekaligus merawat keseimbangan alam, dari potensi berbagai bencana di masa depan.

“Jadi merawat dan menjaga pohon, adalah bentuk usaha kita dalam rangka mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.

Pria asal Kabupaten Bone ini mengharapkan, upaya pelestarian pohon bisa dilakukan di semua elemen masyarakat.

“Jadi penting diberikan pemahaman generasi kita sejak dini. Pentingnya menanam dan merawat pohon. Mari bersama-sama menjaga lingkungan untuk kepentingan bersama,” ucap Andi Akmal Pasluddin.



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

“Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Kesadaran terhadap lingkungan, akan memperkuat pemikirannya untuk meneruskan keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini secara berkualitas. Kita mulai dengan cara sederhana, yakni melakukan praktik lapang dengan menanam pohon”

Di Samarinda, KH. Aus Hidayat Nur **Disambut** Hangat oleh Habib Dr. Sadiq bin Sahl Jamalul Lail

KUTIPAN

Sabtu (4/12/2021) menjelang Maghrib, KH. Aus Hidayat Nur bersilatutrahim ke kediaman Habib Dr. Sadiq bin Sahl Jamalul Lail, yang merupakan tokoh Rabithah Alawiyah kota Samarinda

"PKS selalu menjaga silatutrahim dengan para ulama dan habib. Sebab dengan silatutrahim kita akan dapat membangun kerjasama di kalangan umat," ungkap KH. Aus Hidayat Nur.

Habib yang pernah menjadi Ketua DPD Robithah Alawiyah Samarinda ini pun menyambut dengan senang hati dan penuh kehangatan. Di tengah-tengah jamuan yang beliau hidangkan, harapan kepada Partai Keadilan Sejahtera pun disampaikan. "PKS diharapkan tetap konsisten membela umat, menjadi oposisi terhadap pemerintah yang kurang berpihak kepada umat. Ustadz sebagai kontrol untuk keberpihakannya kepada rakyat, khususnya umat Islam," harapnya. KH. Aus Hidayat Nur yang

ditemani oleh Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Arif Kurniawan dan Sekretaris DPC PKS Sambutan Abdur Rosyad pun menegaskan bahwa kerjasama di kalangan umat Islam ini penting untuk menjaga persatuan nasional. "PKS terus berusaha untuk menjaga persatuan nasional, karena bagaimanapun bangsa ini mayoritasnya adalah umat Islam," pesan Anggota Badan Sosialisasi MPR RI yang kerap masuk ke pedalaman Kaltim untuk Sosialisasi 4 Pilar MPR RI.

Sebagai informasi, Habib Sadiq bin Sahl Jamalul Lail merupakan keturunan dari Al Habib Alwy bin Abdullah bin Sahl Jamalullail yang terkenal dengan sebutan Sohibil Mandar, karena perannya

merintis penyebaran Islam di Mandar, Sulawesi Barat. Beliau melahirkan banyak ulama sunni karismatik baik dari anak-cucunya maupun murid-muridnya. Di antara muridnya adalah KH. Muhammad Tahir, yang bergelar Imam Lapeo, seorang ulama karismatik di tanah Mandar.

"PKS sudah sangat dekat dengan sosok-sosok ulama dari silsilah beliau. Bahkan beberapa tokoh di PKS seperti almarhum KH. Rahmat Abdullah dan almarhum KH. Ruslan Effendi pernah juga menjadi murid dari Al Habib Alwi dan Al Habib Idrus Jamalullail yang merupakan zuriyah Sohibil Mandar Al Habib Jamalullail," ungkap Kyai Aus.

Sebelum adzan Isya' berkumandang, agenda silatutrahim tersebut diakhiri. Lantunan doa terus keluar dari lisan Habib Sadiq untuk kebaikan keluarga besar PKS.



KH. AUS HIDAYAT NUR

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Timur

"PKS sudah sangat dekat dengan sosok-sosok ulama dari silsilah beliau. Bahkan beberapa tokoh di PKS seperti almarhum KH. Rahmat Abdullah dan almarhum KH. Ruslan Effendi pernah juga menjadi murid dari Al Habib Alwi dan Al Habib Idrus Jamalullail yang merupakan zuriyah Sohibil Mandar Al Habib Jamalullail"



BABAK FINAL
Lomba
**PIDATO
BIOGRAFI
TOKOH
BANGSA**
TINGKAT NASIONAL 2021



PEMENANG BABAK FINAL

LOMBA PIDATO BIOGRAFI TOKOH BANGSA

23 Desember 2021



Irwan Ray
Aceh
Jenderal Soedirman

Skor:
1550

Juara Pertama
7.500.000



Ferli Kinanthi
Jawa Tengah
Mbah Kyai Subkhi

Skor:
1465

Juara Kedua
5.000.000



Sopian Kamil
Yogyakarta
KH. Hasyim Asy'ari

Skor:
1460

Juara Ketiga
3.500.000



Haifa Nailah Muttaqin
Jawa Barat
Rahmah El Yunusiyah

Skor:
1445

Harapan Satu
2.500.000



Johannes Chairul
Sumatera Utara
R.A Kartini

Skor:
1440

Harapan Dua
2.000.000



Muhammad Husnul
Nusa Tenggara Barat
TGHK. M. Zainuddin Abdul

Skor:
1430

Harapan Tiga
1.500.000

Apresiasi Lomba Baca Kitab Kuning V di DKI Jakarta

HNW Harap Jadi Spirit Tingkatkan Kualitas Indonesia

KUTIPAN

Jakarta (06/12) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tahunan nasional; Lomba Baca Kitab Kuning, yang diselenggarakan oleh PKS.

Hidayat juga berharap agar kegiatan ini menyemangati para Santri khususnya dan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas ilmu, amal dan wawasan mereka, dengan meningkatkannya minat baca.

"Sebagaimana yang telah diteladankan oleh para bapak bangsa dan ulama-ulama pendiri bangsa, agar Santri generasi milenial bisa lebih berkontribusi dalam mencintai peradaban dan berkontribusi membangun Indonesia secara lebih baik lagi," ungkap pria yang akrab disapa HNW dalam final Lomba Baca Kitab Kuning V di tingkat Provinsi DKI Jakarta 2021 yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Sabtu (04/12/2021).

HNW mengatakan bahwa membaca Kitab Kuning di kalangan Pesantren ini merupakan salah satu warisan para ulama pendiri bangsa di Indonesia.

"Beberapa ulama pendiri bangsa dari latar belakang Ormas dan Orpol, seperti KH Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Dahlan, KH Wahab Hasbullah, Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, KH Kahar Muzakkir, H Agus Salim, KHA Sanusi, M Natsir dan lain sebagainya yang merupakan Ulama Pejuang dari kalangan pesantren yang akrab dengan Kitab Kuning," sebut HNW.

"Mereka semua itu adalah para pembaca Kitab Kuning yang tekun, dan berasal dari beragam pesantren. Para Kiai

atau ulama pendiri bangsa itu semakin mempelajari kitab kuning, semakin paham Agama Islam, semakin berjuang untuk Indonesia, dan mencintai dan mempertahankan Indonesia Merdeka bahkan dengan semangat fatwa berjihad untuk Indonesia. Artinya, semakin 'tafaqquh fiddin' (mendalami agama Islam), semakin banyak kitab yang mereka baca, semakin mencintai dan membela Indonesia," jelasnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan warisan para ulama pendiri bangsa yang gemar membaca tersebut perlu terus dijadikan inspirasi dan dilanjutkan bersama. Apalagi, dalam suatu survey dari UNESCO beberapa tahun lalu, disebut bahwa minat membaca masyarakat Indonesia sangat rendah.

"Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei. Dari 1000 orang di Indonesia, yang memiliki minat baca hanya 1 orang. Ini tantangan yang sangat besar, padahal kita mewarisi semangat baca yang luar biasa dari para pendiri bangsa, termasuk dari kalangan Ulamaanya," tukasnya.

Lebih lanjut, HNW berharap agar pelaksanaan Lomba Baca Kitab Kuning yang secara rutin digelar oleh Fraksi PKS secara nasional dan di tingkat daerah ini bisa menyemangati para santri, dan sekaligus ajang silaturahmi



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Lomba Baca Kitab ini juga bisa menjadi stimulus agar para Santri semakin semangat untuk belajar, membaca dan berlomba dalam kebaikan. Dan Alhamdulillah, lomba ini mendapat sambutan yang luar biasa dari kalangan Pesantren. Jumlah peserta terus bertambah setiap tahunnya

antar Pesantren dan Santri.

"Karena Peserta Lomba Baca Kitab Kuning ternyata datang dari beragam latar belakang Pesantren yang berbeda-beda. Ini juga diharap bisa jadi wasilah untuk mendekatkan para Santri milenial dengan Para Ulama dan

Kitab klasik mereka seperti Kitab Fathul Muin yang dilombakan ini, yang merupakan karya populer di Pesantren-pesantren, yang ditulis oleh seorang Ulama asal Malabar dari India," ujar HNW.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Kunjungi Pasar Lubuk Basung, Nevi **Lakukan** Fungsi Pengawasan APBN pada Revitalisasi Pasar

KUTIPAN

Politisi PKS ini mengharapkan pasar yang di revitalisasi ini akan menjadi pusat perdagangan rakyat di sekitar Lubuk Basung Kabupaten Agam. Ia meminta kepada pemerintah pusat dan daerah akan memberikan fasilitas pasar-pasar rakyat yang akan di jangkau secara mudah pada titik-titik yang tepat dan strategis.

Kabupaten Agam (13/12) — Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina melaksanakan salah satu fungsi kerja DPR berupa pengawasan revitalisasi pasar tahun 2022 yang berasal dari APBN.

Penyaluran anggaran negara melalui Kementerian Perdagangan ini merupakan sebuah upaya pengembangan ekonomi kerakyatan yang diimplementasikan pada perbaikan pasar.

"Saya apresiasi pada semua pihak yang turut bersama-sama mengupayakan pembangunan pasar-pasar di

daerah. Pengawasan yang melibatkan seluruh stake holder termasuk pemerintah daerah melalui dinas Koperindag dan juga para wali nagari serta tokoh-tokoh masyarakat menjadikan progres revitalisasi pasar ini semakin cepat selesai", tutur Nevi.

Politisi PKS ini mengharapkan pasar yang di revitalisasi ini akan menjadi pusat perdagangan rakyat di sekitar Lubuk Basung Kabupaten Agam. Ia meminta kepada pemerintah pusat dan daerah akan memberikan fasilitas pasar-pasar rakyat yang

akan di jangkau secara mudah pada titik-titik yang tepat dan strategis.

Nevi mengatakan, Program pemerintah dari kemendag berupa pasar sebagai pusat perdagangan rakyat perlu di masifkan di berbagai wilayah terutama pada daerah-daerah terkonsentrasinya penduduk dimana daerah itu belum ada pasarnya.

"Salah satu ciri kemajuan suatu daerah dapat terlihat dari dinamisnya pasar rakyatnya. Kebersihan, kenyamanan, keamanan dan keramaiannya menunjukkan tingkat kemakmuran rakyat di sekitarnya, karena terlihat daya beli nya. Kami berharap masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Agam ini mendapatkan fasilitas pasar-pasar rakyat yang modern dan merata di setiap daerahnya", tutur Nevi Zuairina.



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

"Saya apresiasi pada semua pihak yang turut bersama-sama mengupayakan pembangunan pasar-pasar di daerah. Pengawasan yang melibatkan seluruh stake holder termasuk pemerintah daerah melalui dinas Koperindag dan juga para wali nagari serta tokoh-tokoh masyarakat menjadikan progres revitalisasi pasar ini semakin cepat selesai"



Live Interactive

Bersama
Anggota
Legislatif PKS



ERLANDA

WIDYA

YOANDRO



Saksikan Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB



Kunjungi Dapil, Nasir Djamil Minta Semua Pihak Peduli Disabilitas

KUTIPAN

Nasir Djamil mengatakan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka memberikan dukungan dan perhatian akan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya mengenai pemahaman tentang Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.

Banda Aceh (02/11) — Dalam rangka peringatan Hari Disabilitas yang diperingati setiap tanggal 3 Desember, Anggota DPR RI Asal Aceh Nasir Djamil turut didampingi oleh Ketua Pertuni Aceh M. Nur sukses melaksanakan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan bersama penyandang disabilitas se-Aceh pada Rabu (01/12/2021).

Nasir Djamil mengatakan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka memberikan dukungan dan perhatian akan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya mengenai

pemahaman tentang Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.

“Kepedulian terhadap disabilitas perlu ditingkatkan dan melalui kegiatan sosialisasi ini sebagai upaya meningkatkan wawasan kebangsaan dan pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar dasar negara Indonesia” Kata Nasir Djamil.

Kegiatan sosialisasi yang dihadiri 150 orang penyandang disabilitas di Provinsi Aceh bisa dikatakan wujud peran

disabilitas berupaya menjadi anggota masyarakat yang lebih sadar akan peran pentingnya dalam menjaga keutuhan NKRI.

Ketua Forbes DPR RI dan DPD Aceh tersebut mendorong pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam kesempatan itu, para penyandang disabilitas kepada Nasir Djamil secara terbuka mengutarakan berbagai keluhan akan masih kurangnya implementasi dan pemenuhan hak-hak disabilitas.

Nasir Djamil mengharapakan masyarakat tetap optimis terutama bagi penyandang disabilitas untuk terus berpartisipasi secara aktif ditengah masyarakat.

“Perlu dukungan berbagai pihak memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak mereka dengan baik, untuk itu saya minta semua pihak peduli disabilitas” Tutup Nasir Djamil.



H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nangroe Aceh Darussalam II

“Kepedulian terhadap disabilitas perlu ditingkatkan dan melalui kegiatan sosialisasi ini sebagai upaya meningkatkan wawasan kebangsaan dan pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar dasar negara Indonesia”



Komisi III DPR FPKS **Dukung** Polda Aceh Periksa Oknum Polisi Penganiaya di Bener Meriah

KUTIPAN

Jakarta (08/12) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS M Nasir Djamil yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan mendukung penuh langkah oleh Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melakukan pemeriksaan terhadap oknum polisi di Bener Meriah.

Kasus yang viral di media sosial ini, diduga dilakukan oknum polisi setempat sebagai 'aktor' penganiayaan hingga menewaskan seorang tahanan bernama Saifullah.

Nasir Djamil menjelaskan agar semua proses pemeriksaan terhadap oknum polisi tersebut dilakukan secara mendalam karena apabila kemudian ditemukan delik pidana, maka kasus tersebut harus diproses secara hukum, guna memberikan kepastian hukum dan persamaan dimata hukum.

"Jika terbukti ada indikasi pidana dalam kasus ini, maka harus diproses sesuai hukum

yang berlaku. Hal ini dimaksud agar semangat Equality before the law benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat," ucap Nasir

Nasir sebagai Ketua Forbes juga mengharapkan para pimpinan Kepolisian Resor Bener Meriah untuk kiranya mengambil tanggungjawab secara penuh atas kasus yang sedang ditangani. Oleh karenanya, segala konsekuensi yang diakibatkan oleh anak buah dilapangan harus menjadi tanggungjawab pimpinan.

"Pimpinan Resor Bener meriah memiliki tanggungjawab besar terhadap anak buahnya dilapangan. Kalau ditemukan

ada pelanggaran pidana dan SOP, maka jangan ragu untuk ditindak dan patut untuk dipertimbangkan posisi para pimpinan kepolisian resor tersebut". Tukas Nasir

Pemeriksaan terhadap oknum polisi tersebut dilakukan Polda Aceh atas laporan keluarga korban ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Aceh pada Jumat 3 Desember 2021 yang lalu.

Sebelumnya, Istri korban (Saifullah), Nilawati menceritakan bila suaminya ditangkap oleh oknum polisi Bener Meriah tersebut di SPBU Diski KM 16 Sei Semayang, Deli Serdang pada akhir November lalu terkait kasus penadah.

Saifullah bahkan sempat dipukul didepan anaknya sembari dibawa oleh oknum polisi tersebut. Saifullah sempat koma di RS Muyang Kute Bener Meriah hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya saat di rujuk keluarga di RSU Zainal Abidin.



H.M. NASIR DJAMIL, M.Si
Anggota Komisi III DPR RI

"Pimpinan Resor Bener meriah memiliki tanggungjawab besar terhadap anak buahnya dilapangan. Kalau ditemukan ada pelanggaran pidana dan SOP, maka jangan ragu untuk ditindak dan patut untuk dipertimbangkan posisi para pimpinan kepolisian resor tersebut"

Berada di Dapil, Toriq Harap Ormas Islam Jadi Pelopor Menjaga NKRI

KUTIPAN

Tasikmalaya (02/12) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat menyebut Organisasi Masyarakat Persaudaraan Muslimah (Salimah) sebagai pionir pemberdayaan perempuan dan keluarga.

Hal ini disampaikan Toriq, saat memberikan arahan pada kegiatan Sosialisasi Empat Pilar (16/11/2021).

"Sebagai Ormas Perempuan di Indonesia yang menitikberatkan pada pemberdayaan perempuan dan keluarga, Salimah harus menjadi pelopor dalam menjaga NKRI dengan menguatkan keluarga-keluarga Indonesia untuk mencetak generasi berkarakter Pancasila," sebut Politisi PKS.

Dalam kegiatan yang digelar di Aula Rumah Kreatif, Kawalu, kota Tasikmalaya ini sebagian besar peserta berasal dari ormas Salimah.

Dihadapan Ketua PD Salimah kota Tasikmalaya Siti Julaehta dan Ketua PD Salimah Wilayah Jabar Wiwi Hartanti,

Toriq menyampaikan rasa bangga atas respon Salimah terhadap beberapa permasalahan yang timbul di masyarakat.

"Sikap tegas Salimah terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021 merupakan wujud nyata dalam menjaga kedaulatan bangsa. Memastikan nilai-nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar Pemerintah dalam menghadirkan kebijakan melalui aturan yang dibuat," ucap Aleg Pusat asal Tasikmalaya.

Toriq menuturkan Permendikbud ini telah menaui protes ditengah masyarakat. Selain tidak sesuai tujuan Pendidikan Nasional, beberapa isinya dan proses pembentukannya pun

tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

"Dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (2) huruf l, m dan n ada frasa 'tanpa persetujuan korban' yang mendegradasi substansi kekerasan seksual, yang mengandung makna dapat dibenarkan apabila ada 'persetujuan korban (consent)'," jelasnya.

Toriq menilai hal ini menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Standar benar dan salah dari sebuah aktivitas seksual tidak lagi berdasar nilai agama dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi persetujuan dari para pihak.

Kemudian Permen Dikbudristek No.30 Tahun 2021 juga tidak memenuhi asas keterbukaan.

"Pihak-pihak yang terkait dengan materi Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021 tidak dilibatkan secara luas, utuh, sekaligus minimnya informasi dalam setiap tahapan pembentukan," ujarnya.

Toriq menambahkan bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

"Sikap tegas Salimah terhadap Permen-dikbud No. 30 Tahun 2021 merupakan wujud nyata dalam menjaga kedaulatan bangsa. Memastikan nilai-nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar Pemerintah dalam menghadirkan kebijakan melalui aturan yang dibuat"

menteri) harus dilakukan berdasarkan asas keterbukaan.

"Kedepan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian dan Lembaga dalam merumuskan kebijakan dan peraturan dan hal

teknis lainnya harus berdasarkan pada nilai-nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," tutupnya.



Profil

- Nama Lengkap
Dr. H. R. Achmad Dimiyati
Natakusumah, SH, MH, M.Si.
- Dapil
Banten I
(Kab. Pandeglang
dan Kab. Lebak)



Pendidikan

- S1 : Ilmu Hukum,
Universitas Indonesia &
Esa Unggul Jakarta
- S2 : Ilmu Politik,
Universitas Indonesia
- S2 : Ilmu Hukum,
Universitas Pasundan
- S3 : Ilmu Hukum,
Universitas Padjajaran
- S3 : Ilmu Politik,
Universitas Indonesia
- Lemhanas



Riwayat Pekerjaan

- Bupati Kab. Pandeglang, 2000 – 2005
- Bupati Kab. Pandeglang, 2005 – 2009
- Dosen FISIP UNMA, 2006
- Dosen Pasca Sarjana Ilmu hukum UNMA, 2013
- Wakil Ketua baleg DPR RI, 2009 – 2014
- Komisi Hukum / KMS 3 DPR RI, 2009 – 2013
- Komisi Pemerintahan / KMS 2 DPR RI, 2013 – 2014
- Komisi Pertahanan, Kominfo, TNI/KMS 1 DPR RI,
2014 – 2018



Keluarga

- Istri : Hj. Inna Narulita, SE., MM.
- Anak : 1 Laki-Laki
2 Perempuan



Riwayat Organisasi

- Ketua KADIN Jabar, 1995 – 2000
- Ketua HIPMI Jabar, 1995 – 2000
- Ketua PERSIPAN, 2000 – 2010



Media Sosial

@dimiyatnatakusumah99

ACHMAD DIMYATI

- Tim Kajian MPR RI, 2009 – 2014
- Tim Kajian MPR RI, 2014 – 2018
- Wakil Ketua MPR RI, 2014
- Wakil Ketua BURT DPR RI, 2014 – 2018
- Anggota DPR/MPR RI FPKS, 2019 – 2024
- Anggota Komisi 3 Hukum DPR RI,
2019-2024
- Wakil Ketua BURT DPR RI, 2019 – 2024

Tim Bukhori Terima Aspirasi Penyuluh Agama di Kabupaten Kendal

KUTIPAN

Kabupaten Kendal (03/12) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menerima kunjungan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kabupaten Kendal.

Dalam kesempatan itu, Bukhori yang diwakili oleh tenaga ahli di dapil menyambut hangat kedatangan pihak perwakilan FKPAI di Rumah Aspirasi.

"Kami menyambut baik kesempatan silaturahmi ini sebagai upaya untuk memelihara relasi dengan konstituen. Hanya melalui komunikasi yang intens, kami bisa memperoleh kabar terkini perihal isu-isu yang perlu segera ditanggapi dan diselesaikan, khususnya seputar permasalahan yang dialami oleh para penyuluh agama yang merupakan ujung tombak Kementerian Agama di akar rumput," jelas Saifullah, Tenaga Ahli Bukhori di Kabupaten Kendal, Rabu (02/12/2021).

Salah satu perwakilan FKPAI menuturkan, dampak pandemi telah membuat penyuluh agama mengalami kendala dalam melakukan aktivitas penyuluhan

di masyarakat lantaran interaksi yang dibatasi. Selain itu, pandemi juga telah mendorong transformasi budaya kerja para penyuluh agama dari pendekatan konvensional beralih ke pendekatan digital, salah satunya strategi dalam mensosialisasikan kebijakan terkini Kementerian Agama kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, mereka berharap Kementerian Agama bisa memberikan dukungan perangkat teknologi berupa laptop demi menunjang adaptasi dan kinerja penyuluh agama.

Selain itu, para perwakilan ini juga mengeluhkan masalah klasik yang tidak kunjung terpecahkan. Mereka menyampaikan keresahan soal honor yang dinilai kurang sepadan dengan beban kerja yang diterima. Pasalnya, jumlah penyuluh agama di setiap kecamatan yang hanya berjumlah delapan orang diper-

lukan untuk menutup kebutuhan di setiap desa/kelurahan yang bisa mencapai 20.

"Kami berharap Pak Kiai (Bukhori) bisa memperjuangkan aspirasi kami agar honor kami bisa disesuaikan dengan layak berdasarkan beban kerja yang kami terima. Keterbatasan modal operasional sejujurnya menjadi kendala berarti dalam menjalankan tugas-tugas kami sehingga sulit untuk maksimal," ujar salah satu perwakilan.

Di akhir pertemuan, mereka juga mengajukan permohonan audiensi dengan Bukhori Yusuf secara langsung dalam agenda reses bulan Desember. Pertemuan itu rencananya akan melibatkan sebanyak 160 penyuluh agama non ASN se-Kabupaten Kendal.

Merespons hal itu, Saifullah mengatakan agenda audiensi dengan penyuluh agama akan diagendakan pada kegiatan reses di bulan Desember. Dirinya berharap FKPAI segera menyiapkan catatan aspirasi untuk disampaikan kepada wakil mereka di DPR.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



SAIFULLAH

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI

"Kami menyambut baik kesempatan silaturahmi ini sebagai upaya untuk memelihara relasi dengan konstituen. Hanya melalui komunikasi yang intens, kami bisa memperoleh kabar terkini perihal isu-isu yang perlu segera ditanggapi dan diselesaikan, khususnya seputar permasalahan yang dialami oleh para penyuluh agama yang merupakan ujung tombak Kementerian Agama di akar rumput



Kunjungi Dapil, Hermanto Serahkan Bantuan Kampung Buah Jeruk ke Petani Padang

KUTIPAN

Padang (11/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Sumbar I Hermanto dalam rangkaian kunjungannya di daerah pemilihan, Jumat (10/12/2021) menyempatkan bertemu dengan kelompok tani (Poktan) Telaga Biru, Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.

Diakhir pertemuan Hermanto menyerahkan bantuan Kampung Buah Jeruk dilanjutkan tanam perdana bibit jeruk di lahan kelompok tersebut.

"Bantuan Kampung Buah berasal dari dana APBN. Bantuan tersebut merupakan apresiasi sekaligus perhatian negara kepada para petani," kata Hermanto.

Para petani, menurut Hermanto, patut mendapat apresiasi karena telah memberikan kontribusi pada pertumbuhan positif sektor pertanian.

"Di masa pandemi covid-19 ini, semua sektor mengalami pertumbuhan negatif kecuali pertanian tumbuh positif," tutur legislator dari FPKS DPR RI ini.

Dalam penyerahan bantuan tersebut, Hermanto didampingi Lurah Lubuk Minturun Iwan dan tokoh muda setempat Dede Suhendi. Disamping Kampung Buah Jeruk, dalam kunjungan sebelumnya Hermanto juga sudah menyerahkan bantuan Kampung Buah Durian kepada 2 Poktan dan Kampung Buah Lengkek kepada 1 Poktan.

Penerima bantuan Kampung Buah Durian adalah Poktan Alam Mintanak, Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang dan Poktan Muaro Sepakat, Nagari Kotohilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.

Adapun bantuan Kampung Buah Lengkek diterima Poktan Sarumpun Saiyo, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan.

Selain Kampung Buah Jeruk, Durian dan Lengkek, masih ada satu bantuan kampung buah lagi yang masih dalam proses yaitu Kampung Buah Alpukat.

Bantuannya sudah tiba di Poktan Kube Dua, Kampung Koto Panjang, Nagari Punggasan Timur, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam program kampung buah, selain bibit tanaman buah, bantuannya disertai pula dengan pupuk organik, dolomit dan pupuk NPK.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Bantuan Kampung Buah berasal dari dana APBN. Bantuan tersebut merupakan apresiasi sekaligus perhatian negara kepada para petani," Para petani patut mendapat apresiasi karena telah memberikan kontribusi pada pertumbuhan positif sektor pertanian. Di masa pandemi covid-19 ini, semua sektor mengalami pertumbuhan negatif kecuali pertanian tumbuh positif,"

Terima Aspirasi Walinagari Kabupaten 50 Kota **Nevi Ajak Kolaborasi Negara dan Nagari untuk Rakyat**

KUTIPAN

Jakarta (28/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina kedatangan sebelas walinagari yang berasal dari kabupaten 50 Kota yang ia terima di Gedung Nusantara 1 lantai 3 ruang Aspirasi FPKS DPR RI.

Kesebelas Walinagari yang hadir pada kesempatan ini adalah Sudhari Walinagari Tarantang, Ardi Walinagari Limbanang, Dodi Walinagari Bukik Limbuku, Rifdal Walinagari Pangkalan, Gusfaldi Walinagari Andiang, Syahrial Datuk Sinaro Panjang Walinagari Koto Tuo, Zulfahmi Walinagari Galugua, Anuar Datuk Bosa Wali Nagari Koto Lamo, Abdul Maliki Wali Nagari Koto Alam, Syaflan Nur Wali Nagari Piobang, dan Pen Yul Hasni Wali Nagari Sungai Panjang.

"Selamat datang di Gedung DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Perkenalkan saya Hj. Nevi Zuairina Anggota DPR RI FPKS Dapil Sumatera Barat 2 dimana kabupaten 50 kota menjadi salah satu dari 8 kota kabupaten yang ada didalamnya. Saat ini saya ditempatkan

di komisi 6 DPR RI dengan mitra yang meliputi Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi/BKPM, dan beberapa Lembaga pemerintahan lainnya", kata Nevi Mengawali Sambutannya.

Politisi PKS ini sangat mengapresiasi kehadiran bapak-bapak wali nagari di gedung DPR dimana sangat jauh dari kampung halaman tapi bertekad ke Jakarta untuk diskusi dengan Anggota DPR yang mewakili mereka.

Pada dialog tersebut, Nevi menegaskan akan terus berikhtiar dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Ia mengatakan, Pembangunan di Indonesia tidak serta merta bisa maju begitu saja, tanpa melibatkan pembangunan di

desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pemerintah pusat terus berupaya untuk meningkatkan pendampingan dan perhatian kepada masyarakat desa dimanapun berada, termasuk diseluruh kabupaten 50 kota.

"Saya sebagai legislator dipusat tentu juga berusaha semaksimal mungkin memberikan perhatian kepada masyarakat 50 kota sebagai konstituen di dapil. Sampai dengan saat ini, cukup banyak program pusat yang sudah dibawa ke 50 kota. Namun, saya minta maaf karena keterbatasan saya yang seorang diri, belum semua bisa mendapat dan merasakannya", tuturnya.

Anggota DPR Komisi VI ini juga menyampaikan kepada bapak-bapak wali nagari yang hadir bahwa ketika suara PKS tinggi di 50 kota dan semakin banyak anggota dewan dari PKS, akan menjadi tantangan kedepan untuk lebih berupaya meningkatkan pemerataan pembangunan.

"Kita Semua mesti bekerjasama mulai dari wali nagari hingga pemerintahan pusat untuk memberikan dampak kepada pemerataan



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

"Kita Semua mesti bekerjasama mulai dari wali nagari hingga pemerintahan pusat untuk memberikan dampak kepada pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu, saya berharap kita bisa berkolaborasi dalam pembangunan di desa dan di Jakarta, pada saat ini, maupun dimasa depan nanti"

pembangunan yang berkeadilan dan kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu, saya berharap kita bisa berkolaborasi dalam

pembangunan di desa dan di Jakarta, pada saat ini, maupun dimasa depan nanti", tutup Nevi Zuairina.

Fraksi PKS Siap Perjuangkan Aspirasi Guru Madrasah terkait Problem SK Inpassing Kemenag

KUTIPAN

Jakarta (6/12) — Anggota Legislatif Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori, menerima kunjungan dan audiensi dari Forum Guru Sertifikasi Non Inpassing (FGSNI) Kementerian Agama Indonesia mengenai problem terkait Surat Keputusan (SK) Inpassing Guru Madrasah pada Senin (6/12) siang secara hybrid luring dan daring.

Dalam audiensi yang berlangsung selama kurang lebih satu jam tersebut, FGSNI dari beberapa daerah seperti Bogor, Sukabumi, Purbalingga, Brebes, Temanggung, dan Banyumas mengutarakan keresahan mereka tentang kebijakan SK Inpassing Guru Madrasah yang diatur oleh Kementerian Agama yang tidak lagi ditindaklanjuti sejak kebijakan tersebut pertama kali diimplementasikan pada 2011 lalu.

“SK Inpassing atau penyetaraan jabatan, golongan, dan gaji di Kemenag ini program yang baru ada sekali

pada tahun 2011. Hingga tahun ini, belum ada program serupa yang dimunculkan kembali. Kenapa hal ini perlu diperjuangkan, karena hal ini berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan. Sistem inpassing di Kemenag berbeda dengan sistem di Kemendikbud atau Kemenpora. Tidak berjalan, tidak efektif,” Agus Mochtar, Ketua Umum FGSNI, memaparkan.

Teddy Malik, Ketua FGSNI Sukabumi, melanjutkan bahwa para guru Madrasah berharap agar pada akhir 2021, SK Inpassing kembali diberikan supaya para guru Madrasah

dapat diangkat per Februari 2022. Teddy membandingkan kondisi Inpassing Kemenag dengan program serupa, yakni PPPK dari Kemendikbud, yang progress-nya jauh lebih lancar.

“Program Inpassing yang sama-sama mengenai kesejahteraan dan penambahan tunjangan sampai saat ini belum ada progress-nya. Dari sini kami juga berharap bagaimana caranya kami bisa mendapatkan SK Inpassing sesuai janji Pemerintah sebanyak 77 ribu. Semoga tuntutan kami bisa direalisasikan tahun ini,” imbuh Teddy.

Berdasarkan komunikasi dan korespondensi Bukhori dengan Muhammad Zain, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama RI, legislator yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Tengah I tersebut meyakinkan FGSNI bahwa berbagai masalah yang dihadapi para guru Madrasah tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh Kemenag.

“Verifikasi atau



KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

“Verifikasi atau pemberkasan Inpassing itu ada sekitar 100 ribu kuota. Saya juga sudah menyampaikan hal ini dalam rapat dengan Menteri Agama pada Selasa lalu, semoga hasilnya positif. Kami menyadari bagaimanapun juga Madrasah itu ujung tombak untuk perjuangan kita,”

pemberkasan Inpassing itu ada sekitar 100 ribu kuota. Saya juga sudah menyampaikan hal ini dalam rapat dengan Menteri Agama pada Selasa lalu, semoga hasilnya positif. Kami menyadari

bagaimanapun juga Madrasah itu ujung tombak untuk perjuangan kita,” pungkas Kapoksi Komisi VIII DPR RI tersebut.



Terima Kasih

Atas penghargaan KWP Award.
Fraksi PKS dinobatkan sebagai Fraksi DPR
yang peduli pada Isu Kebencanaan.



Penyandang Disabilitas Belum Terpenuhi Haknya dalam Pekerjaan, Aleg PKS Harap Pemerintah Berpihak

KUTIPAN

Pontianak (03/12) — Dalam Peringatan Hari Disabilitas Internasional, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin, berharap kepada pengusaha dan Kementerian Ketenagakerjaan memberi kesetaraan terhadap penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya.

"Dalam aturan pun sudah jelas mengenai pekerjaan bagi penyandang disabilitas pada Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada bagian keempat mengenai Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi" Tulis Alifudin dalam keterangannya, Jumat (03/12).
Dalam isi UU No 8 tahun 2016 tersebut bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

"Perusahaan sudah menjalankan aturan mewajibkan 1% difable dipekerjakan? Menurut saya belum seluruh perusahaan

, maka Kementerian terkait harusnya bertindak tegas terhadap perusahaan yg tidak menjalankan" tulis Alifudin.

Alifudin pun menambahkan, bahwa pemenuhan hak kepada difable itu harus ditanggapi serius, jangan memberikan perbedaan antara difable dengan non difable, dalam pemberian kerja, syarat dan aturan untuk menjadi pekerja, fasilitas atau sarana prasarana kantor yang berkeadilan.

"Adapun keterkaitan dengan UU Cipta Kerja tentang difable, seharusnya juga bisa di sikapi bersama, kenapa kami PKS menolak, karena kami satunya tidak berpihak

terhadap Penyandang Disabilitas" tambah Alifudin.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja istilah kata 'cacat' masih dipergunakan yang berarti berbanding terbalik dengan gerakan para difable yang telah memperjuangkan cara pandang hak asasi manusia.

"Diksi cacat itu menyalahi kesepakatan bersama negara-negara di dunia, mengenai Hak Penyandang Disabilitas atau UNCRPD. Istilah itu juga mengabaikan banyak ketentuan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas" tulis Bang Alif, sapaan akrabnya.

Kelompok penyandang disabilitas tidak pernah diperhitungkan dan tidak dilibatkan sejak awal proses pembahasan. Padahal substansi UU Cipta Kerja sangat relevan dan berdampak terhadap kehidupan penyandang disabilitas.

"Kami berharap semua elemen harus mengawal bersama atas putusan MK terhadap UU Cipta Kerja ini, terkhusus kita juga akan berjuang bersama dengan penyandang disabilitas agar



H. ALIFUDIN, S.E., M.M.

Anggota Komisi IX DPR RI

"Diksi cacat itu menyalahi kesepakatan bersama negara-negara di dunia, mengenai Hak Penyandang Disabilitas atau UNCRPD. Istilah itu juga mengabaikan banyak ketentuan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas"

mereka mendapat keberpihakan yang nyata" tambah Ketua BPW Kalimantan PKS.

Alifudin menambahkan, bahwa UU Cipta kerja tidak

harmonis dan sinkron dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peringati Hari Disabilitas,

HNW: Kemensos Tingkatkan Pemenuhan Hak & Bantuan bagi Penyandang Disabilitas

KUTIPAN

Jakarta (03/12) --- Anggota DPR Komisi VIII sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengingatkan bahwa Hari Peringatan Disabilitas Internasional (3 Desember 2021),

agar menjadi momentum untuk mengevaluasi supaya orientasi kepada kaum difabel tidak hanya berhenti pada charity (bantuan) tapi lebih mengarah juga kepada pemenuhan right (hak) kaum difabel.

Hal tersebut, tegas Hidayat, memerlukan empati yang tinggi dari Kemensos. Sehingga wajar bila tindakan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang dinilai memaksa seorang tunarungu untuk bicara dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Rabu (01/12/2021), mendapatkan kritikan meluas.

"Karena yang demikian itu tidak menunjukkan empati Menteri Sosial sebagai Menteri yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas," ujarnya.

Apalagi, imbuh Hidayat, kritik terhadap Mensos juga datang dari komunitas tuna rungu hingga para aktivis disabilitas.

"Dalam rangka memperingati hari disabilitas internasional, saya menyayangkan tindakan Mensos yang justru 'memaksa' penyandang disabilitas untuk berkomunikasi tidak dengan bahasa mereka. Setelah banyaknya kritik, termasuk dari komunitas tuna rungu dan para aktivis disabilitas, lebih baik Mensos secara terbuka meminta maaf, agar ada keteladanan dan empati yang kuat terhadap masalah kaum difabel. Bukan justru beralasan pemaksaan

bicara itu dalam rangka mengetes alat bantu dengar yang tidak menyelesaikan masalah, tapi malah memperpanjang masalah," ujar HNW dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (03/12).

Sebagai mitra Kemensos di DPR, HNW mendesak agar Mensos betul-betul menjadi leading sector, karenanya lebih fokus menangani soal disabilitas dan kaum difabel ini dengan memenuhi hak-hak mereka, selain menyediakan bantuan bagi para penyandang disabilitas.

HNW menjelaskan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2020 mencapai 22,9 juta orang. Namun, bantuan apalagi hak yang diberikan kepada mereka masih sangat kecil.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Mensos harusnya tidak hanya sekedar mengadakan peringatan seremonial apalagi sampai menyakiti atau menimbulkan kontroversi di lingkungan mereka. Mensos mestinya koreksi kondisi yang masih jauh dari ideal di atas dengan mengarahkan Kemensos agar lebih fokus melaksanakan program-program yang terkait dengan pemenuhan hak serta bantuan untuk kaum difabel, baik melalui peningkatan kemitraan di dalam negeri

Peringati Hari Disabilitas, Bukhori Serahkan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas

KUTIPAN

Kabupaten Semarang (06/12) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyerahkan bantuan Alat Ganti Tubuh dan kursi roda kepada penyandang disabilitas di daerah pemilihan Kota Semarang dan Kabupaten Kendal dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional.

"Bantuan ini telah kami advokasikan di Kementerian Sosial sejak dua bulan silam. Alhamdulillah bantuan ini bisa terealisasi bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional sehingga menjadi kado indah bagi Ibu dan Bapak sekalian," ucap Bukhori dalam acara serah terima bantuan di Kabupaten Kendal, Jumat (03/12/2021).

Legislatur Dapil Jawa Tengah 1 ini mengatakn, kendati usulan disampaikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos), teknis pencairan bantuan dilakukan oleh Dinas Sosial yang dibantu oleh Balai Besar Disabilitas Kartini Kementerian Sosial yang bertempat di Temanggung Jawa Tengah.

"Balai ini merupakan merupakan Unit Pelaksana Teknis Kemensos yang memberikan pelayanan rehabilitasi sosial lanjut kepada penyandang disabilitas yang pernah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar dan atau perlu perlindungan," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, politisi PKS ini menyerahkan alat bantu disabilitas kepada sembilan penerima manfaat yang masing-masing berasal dari Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. Alat bantu tersebut meliputi dua kursi roda dan tujuh Alat Ganti Tubuh yang terdiri dari lima Prothesa Bawah Lutut dan dua Prothesa Atas Siku.

"Melalui kewenangan yang kami miliki, kami berupaya

menghadirkan kesetaraan bagi setiap warga negara, termasuk mereka yang acap kali luput dari perhatian yakni penyandang disabilitas. Bagi PKS, setiap bantuan yang diberikan oleh siapapun kepada penyandang disabilitas tidak semestinya diorientasikan sebagai sumbangan, hadiah, atau wujud iba. Akan tetapi itu merupakan hak mereka yang mesti kita penuhi. Sebab, penyandang disabilitas tidak boleh dipandang sebagai objek yang dikasihani, melainkan sebagai subjek berdaya yang mesti terpenuhi haknya," pungkasnya.

Anggota Komisi Sosial ini membeberkan sejumlah advokasi yang telah dilakukan oleh Fraksi PKS DPR RI dalam mewujudkan kebijakan inklusif yang memihak pada hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Indonesia.

Diantaranya, mengingatkan pemerintah agar memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sesuai amanat UU Penyandang Disabilitas.

Dalam bidang pendidikan, Fraksi PKS turut memperjuangkan kebijakan afirmatif bagi



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

"Bantuan ini telah kami advokasikan di Kemensos sejak dua bulan silam. Alhamdulillah bantuan ini bisa terealisasi bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional sehingga menjadi kado indah bagi Ibu dan Bapak sekalian

guru disabilitas pada program rekrutmen Guru PPPK.

Selanjutnya, Fraksi PKS juga mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran bagi pendidikan inklusif secara memadai dan mengkritik pra konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang belum memasukkan layanan penyandang disabilitas.

"Upaya membangun kesetaraan warga negara salah

satunya dimulai dari cara pandang penyelenggara negara yang mesti melihat penyandang disabilitas sebagai subjek berdaya yang harus dipenuhi haknya (right-based) sehingga bisa menjalankan peran dan kewajibannya sebagai warga negara yang dapat menyukseskan program pembangunan nasional," pungkasnya.

Anggota FPKS Sebut UU Cipta Kerja **Tidak Adil** Bagi Penyandang Disabilitas

KUTIPAN

Jakarta (04/12) --- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyebut perbaikan UU Cipta Kerja perlu mendengar masukan dari kalangan penyandang disabilitas.

Sebab menurut Mufida, teman-teman penyandang disabilitas merasa dirugikan dengan pemberlakuan UU Cipta Kerja.

"Jika yang bermasalah adalah proses pembuatan UU Cipta Kerja yang tidak melibatkan banyak pihak maka hal ini harus diperbaiki dengan mendengarkan aspirasi teman-teman penyandang disabilitas yang merasa dirugikan dalam UU Cipta Kerja," sebut Mufida dalam momentum Hari Disabilitas Internasional.

Mufida menyebut kesetaraan bekerja juga harus dimiliki oleh penyandang disabilitas. Bahkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas mengatur bahwa difabel tetap memiliki hak untuk bekerja, kewirausahaan dan koperasi.

Menurut Mufida, keberat-

an yang disampaikan penyandang disabilitas adalah penyebutan kata 'cacat' dalam UU Cipta Kerja yang dalam UU Penyandang Disabilitas sudah tidak lagi digunakan kata tersebut.

Selain itu, UU Cipta Kerja menganulir ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 24 angka 13 UU Ciptaker yang menghapus ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Penghapusan ini disebut telah menghilangkan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan kemudahan akses bangunan gedung. Sehingga justru menyulitkan para pencari kerja dari kalangan penyandang disabilitas.

"Penggunaan istilah 'cacat' dan penghapusan soal aturan

kemudahan akses ini kan aturan yang mundur. Bekerja adalah hak setiap warga negara termasuk mereka penyandang disabilitas. Kalau aturannya saja tidak berpihak, bagaimana dengan akses kesetaraan dalam bekerja?," ungkap Mufida.

Selain itu aturan durasi pekerja dengan perjanjian kerja dalam waktu tertentu (PKWT) yang otomatis menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) setelah tiga tahun yang dihapus UU Cipta Kerja dinilai ikut berdampak pada pekerja difabel.

"Teman-teman difabel merasa tidak mendapat kepastian, sebab jikapun peralihan ke PKWTT jangka waktunya lebih tidak tentu, teman-teman difabel khawatir pengusaha lebih memorsatkan pekerja dengan fisik yang lebih sempurna dibanding teman-teman difabel," ujar Mufida.

Sebab itu, penting bagi Pemerintah dan DPR untuk mendengarkan masukan dari penyandang disabilitas.

"Jangan sampai seremoni Hari Disabilitas hanya lips service tanpa ada keberpihakan yang nyata bagi mereka," ungkap Mufida.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

"Teman-teman difabel merasa tidak mendapat kepastian, sebab jikapun peralihan ke PKWTT jangka waktunya lebih tidak tentu, teman-teman difabel khawatir pengusaha lebih memorsatkan pekerja dengan fisik yang lebih sempurna dibanding teman-teman difabel,"

Cinta untuk Penyandang Disabilitas, **Aleg PKS: Mereka Masih Sering Rasakan Ketidaksetaraan dan Diskriminasi**

KUTIPAN

Jakarta (04/12) — Memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap 3 Desember, DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial mengintruksikan seluruh kadernya untuk membuat acara ataupun kegiatan dengan tema 'Cinta PKS untuk Penyandang Disabilitas' yang berlangsung, 3-20 Desember 2021.

Acara 'Cinta PKS untuk Penyandang Disabilitas' akan diisi dengan berbagai kegiatan seperti kunjungan ke Pantii Sosial disabilitas, bantuan langsung bagi penyandang disabilitas, penggalangan dan pemberian dana untuk penyediaan fasilitas pendukung penyandang disabilitas hingga seminar maupun diskusi tentang disabilitas.

"Data dari WHO saat ini ada 1 miliar lebih orang di dunia yang mengalami disabilitas. Akan tetapi ini tidak diimbangi dengan kebijakan

maupun program baik dari pemerintah maupun swasta yang ramah untuk penyandang disabilitas," kata Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial Netty Prasetyani saat mengunjungi Yayasan Komunitas Tunarungu Ibtisamah dan Rumah Autis di Kota Bekasi, Jumat (03/12/2021).

Para penyandang disabilitas, kata Netty, kerap kali merasakan diskriminasi dan ketidaksetaraan.

"Dalam akses terhadap hampir semua hal seperti

layanan kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, transportasi publik dan sebagainya," tambahnya.

Netty juga mengingatkan bahwa disabilitas bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal batasan usia.

"Besarnya potensi terjadinya disabilitas ini harus dijawab dengan berbagai kebijakan yang inklusif. Sehingga para penyandang disabilitas tidak lagi merasakan diskriminasi dan merasa terbantu dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada mereka" ungkapnya.

Sebagai Ketua DPP PKS Netty mendorong agar pemerintah turut melibatkan aspek disabilitas dalam setiap pengambilan kebijakan.

"Pandemi Covid-19 yang terjadi semakin membuat penyandang disabilitas sulit karena tidak berpihaknya fasilitas kesehatan serta adanya diskriminasi. Oleh karena itu agar kedepannya hal-hal seperti ini dapat diantisipasi, pengambilan



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial DPP PKS

"Disabilitas bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal batasan usia. "Besarnya potensi terjadinya disabilitas ini harus dijawab dengan berbagai kebijakan yang inklusif. Sehingga para penyandang disabilitas tidak lagi merasakan diskriminasi dan merasa terbantu dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada mereka"

kebijakan perlu melibatkan perwakilan disabilitas langsung, sehingga solusi yang diambil bisa maksimal," kata Netty.

Terakhir saat memberikan sambutan di hadapan komunitas Tunarungu di Yayasan Ibtisamah Bekasi, Netty menyampaikan bahwa setiap orang berhak untuk sukses dan mendapatkan kesempatan yang sama.

"Banyak orang di dunia ini

yang bisa sukses walaupun memiliki keterbatasan. Para penyandang disabilitas juga harus diberikan kesempatan dan ruang agar bisa meraih impian dan cita-citanya. Peran orang tua yang bisa menerima dan menemani buah hatinya sangat penting agar anak-anak penyandang disabilitas bisa menggapai cita-citanya" kata Netty.

PKS Dorong Pengetahuan Legislatif Melalui Pengalaman Magang

KUTIPAN

Dalam pertemuannya bersama salah satu peserta internship FPKS DPRD Sumatera Utara yang akrab disapa Zahra, Ledia menerangkan secara implisit bahwa kegiatan magang ini dilakukan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada kawula muda untuk mencari dan mendapatkan pengalaman di dunia kerja, khususnya kegiatan anggota legislatif dalam mengayomi masyarakatnya.

Jakarta (06/12) - Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah berkunjung ke Medan, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Ledia bertemu dengan Nurdina Azzahra yang merupakan salah satu peserta Internship Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Senin, (06/12/2021) di Sulthan Khupi and Roastery Medan, Sumatera Utara.

"Jadi, program magang yang merupakan kegiatan unggulan dari Humas Fraksi PKS DPR RI ini juga tidak hanya

ada di pusat saja. Tapi, kegiatan pemagangan ini ada di berbagai daerah juga." Ujar Politisi asal Jawa Barat I.

Dalam pertemuannya bersama salah satu peserta internship FPKS DPRD Sumatera Utara yang akrab disapa Zahra, Ledia menerangkan secara implisit bahwa kegiatan magang ini dilakukan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada kawula muda untuk mencari dan mendapatkan pengalaman di dunia kerja, khususnya kegiatan anggota

legislatif dalam mengayomi masyarakatnya.

Sejalan dengan apa yang Ledia sampaikan, Zahra yang merupakan Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara juga sepakat dengan banyaknya 'insight' atau wawasan yang didapatkannya selama magang di Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara walaupun baru satu bulan dan ada sedikit lelah tapi ilmu yang didapatkan seimbang.

"Jadi, kalau mau dapat manfaat yang lebih banyak memang harus mau berlelah-lelah seperti analogi bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian." Tambah anggota Baleg FPKS DPR RI.

Sebagai akhir perjumpaannya bersama Zahra, Ledia mengingatkan kepada muda-mudi lainnya bahwa kedepannya FPKS DPR RI maupun DPRD akan membuka program-program magang lainnya untuk menambah pengalaman, sebab pengalaman adalah guru yang paling berharga.



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

"Jadi, program magang yang merupakan kegiatan unggulan dari Humas Fraksi PKS DPR RI ini juga tidak hanya ada di pusat saja. Tapi, kegiatan pemagangan ini ada di berbagai daerah juga"

Walikota Bandung Mang Oded Wafat, Sekjend PKS: Kami Kehilangan Kader Terbaik

KUTIPAN

Jakarta (10/12) — Warga Kota Bandung hari ini berduka dengan wafatnya Walikota Bandung oded Muhammad Danial atau yang akrab disapa Mang Oded saat hendak menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Al Mujahidin Kota Bandung, Jumat (10/12).

Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Sekjend Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan duka yang mendalam atas berpulangnya Walikota Bandung yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jawa Barat itu.

“Mang Oded merupakan kader terbaik PKS, kami keluarga besar PKS sangat kehilangan. Kabar ini membuat kami terhenyak, ‘al khoir maa qadarallah’,” ungkap pria yang kerap disapa Habib itu.

“Motto hidup beliau sangat menginspirasi kami, beliau selalu bilang ‘ahsanu amala’ yang artinya memberikan amal

terbaik. Itu sangat menginspirasi kami, dan hari beliau wafat dalam kondisi ‘ahsanu amala,’” lanjut Anggota Komisi III tersebut.

“Duka ini sangat mendalam, kami instruksikan seluruh kader untuk melaksanakan shalat ghaib untuk Oded. Insha Allah Husnul Khatimah, beliau orang baik,” tutur Habib Aboe Bakar.



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Sekjen DPP PKS

“Motto hidup beliau sangat menginspirasi kami, beliau selalu bilang ‘ahsanu amala’ yang artinya memberikan amal terbaik. Itu sangat menginspirasi kami, dan hari beliau wafat dalam kondisi ‘ahsanu amala’,”



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***